

**ANALISIS ISU MIGRASI DI POLANDIA PASCA KRISIS IMIGRAN
DI UNI EROPA MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEKURITISASI
PADA TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

YOSRIZAL TANJUNG

19323235

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS ISU MIGRASI DI POLANDIA PASCA KRISIS IMIGRAN
DI UNI EROPA MENGGUNAKAN PENDEKATAN SEKURITISASI
PADA TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

YOSRIZAL TANJUNG

19323235

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Isu Migrasi di Polandia Pasca Krisis Imigran di Uni Eropa
Menggunakan Pendekatan Sekuritisasi Pada Tahun 2015-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Tanda Tangan

Dewan Penguji

- 1 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 31 July 2023



Yosrizal Tanjung

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2	16
2.1 Imigrasi di Polandia	16
2.1.1 <i>Isu Imigrasi di Polandia Sebelum Tahun 2015</i>	16
2.1.2 <i>Kebijakan Imigrasi Polandia Sebelum Tahun 2015</i>	21
2.2 Krisis Imigran di Eropa Tahun 2015-2018	23
2.2.1 <i>Dinamika Krisis Imigran di Eropa Tahun 2015-2018</i>	23
2.2.2 <i>Respons Uni Eropa terhadap Krisis Imigran Tahun 2015-2018</i>	25
2.3 Krisis Imigran Eropa di Polandia Tahun 2015-2018	31
2.3.1 <i>Dinamika Krisis Imigran Eropa di Polandia Tahun 2015-2018</i>	31
2.3.2 <i>Dampak Imigrasi terhadap Polandia</i>	33
2.3.3 <i>Respons Polandia terhadap Krisis Imigran Eropa Tahun 2015-2018</i>	35
BAB 3	39
3.1 Keputusan Polandia dalam Sekuritisasi Isu Imigran	39

3.1.1.	Obyek Referensi	39
3.1.2.	Aktor Sekuritisasi	43
3.1.3.	Aktor Fungsional	48
3.2.	<i>Existential Threat</i>	53
3.3.	<i>Speech Act dan Emergency Action</i>	56
3.3.1.	<i>Speech Act</i>	56
3.3.2.	<i>Emergency Action</i>	58
3.4.	Hubungan antar Unit	60
BAB 4	62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Grafik 1 Jumlah Emigrasi Permanen dari Polandia Tahun 2000-2019	17
Grafik 2 Imigrasi Permanen ke Polandia Tahun 2000-2019	18
Gambar 1 Kuota Migran Berdasarkan Skema Distribusi Uni Eropa	27
Gambar 2 Tingkat Penerimaan Masyarakat Polandia Terhadap Pengungsi Muslim.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengikuti isu-isu yang berubah dalam hubungan internasional, demikian pula para aktor-aktornya. Interaksi dalam urusan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh organisasi internasional, perusahaan multinasional, bahkan aktor non-negara seperti individu berpartisipasi di dalamnya. Isu kemanusiaan saat ini menjadi salah satu isu terpenting dalam tatanan dunia internasional yang disebabkan oleh banyaknya konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai jenis konflik etnis, agama, dan perang saudara menjadikan banyaknya korban dari konflik-konflik tersebut. Realitas konflik yang muncul adalah munculnya pergerakan masyarakat yang terpaksa meninggalkan daerah atau negara asalnya karena situasi yang tidak lagi aman dan tentram. Adanya fenomena perpindahan atau pergerakan masyarakat ini berawal dari keinginan untuk mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman dari negaranya sendiri. Isu pengungsi telah lama menjadi fokus perhatian internasional, begitu pula dengan Uni Eropa sebagai organisasi regional, dan mengangkat isu pengungsi menjadi salah satu prioritas Uni Eropa saat ini.

Pada tahun 2015, Uni Eropa mengalami krisis pengungsi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pengungsi yang tiba di Eropa akibat konflik di Timur Tengah, khususnya Suriah. Dari Januari hingga Agustus 2015, sedikitnya 350.000 pengungsi masuk ke wilayah Eropa, yang mana jumlah ini berkembang hingga 911.000 orang per Desember 2015. Jumlah ini dinilai lebih besar dibandingkan sepanjang tahun 2014, yang mana hanya 380.000 pengungsi yang masuk. Dari

sejumlah negara anggota Uni Eropa saling tukar pendapat tentang kedatangan ratusan ribu pengungsi ataupun imigran yang datang dari berbagai negara konflik. Akan tetapi disamping itu Jerman merupakan salah satu negara yang menyatakan dirinya siap menampung para imigran. Hal itu Jerman memperkirakan akan menampung 800 ribu pengungsi terutama yang berasal dari negara Suriah. Akan tetapi beda halnya dengan Polandia, Hungaria dan Makedonia mereka berusaha akan menutup perbatasan bagi imigran yang ingin masuk ke negaranya (BBC, Why is EU struggling with migrants and asylum? 2016).

Di dunia internasional, pengungsi adalah mereka yang meninggalkan negara sebagai individu atau kelompok karena kecemasan yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya. Pengungsi juga merupakan masalah klasik dalam sejarah manusia. Ada beberapa alasan mengapa individu atau kelompok menjadi pengungsi karena bencana alam, kelaparan, perang yang mengancam keselamatan mereka, dan lain-lain.

Sejak tahun 2014, sesaat setelah situasi di kawasan Timur Tengah mulai memanas sebagian besar masyarakat disana memutuskan untuk meninggalkan negara mereka dan mencari tempat berlindung yang aman dengan mengungsi keluar dari negaranya, mereka melarikan diri dari negaranya yang tengah dilanda konflik dan umumnya mereka mencari tempat yang tentram dan damai Kawasan ramah sosial yaitu kawasan Eropa (UNHCR n.d.). Namun, sebagian besar negara Eropa tidak menginginkan adanya imigran atau pengungsi dari Timur Tengah akibat krisis ekonomi di Eropa, dan negara-negara Eropa tidak dapat menerima dan merawat pengungsi karena keterbatasan biaya. Selain itu, banyak juga masalah *Islamophobia* dan *Xenophobia* yang ada di negara-negara Eropa akibat maraknya

serangan teroris ISIS di Eropa sehingga membatasi penerimaan pengungsi dari Timur Tengah, khususnya yang beragama Muslim.

Meningkatnya berbagai macam konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika selama satu dekade terakhir telah menyebabkan adanya peningkatan jumlah pengungsi yang tiba di Uni Eropa. Polandia, sebagai salah satu negara yang terletak di bagian Eropa Tengah, juga menjadi salah satu tujuan imigrasi para pengungsi, terutama dari Suriah. Lokasi Polandia yang dianggap strategis sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Eropa menjadi faktor yang menarik para imigran untuk datang kesana, baik untuk bekerja maupun mengungsi, ke Polandia.

Kemenangan partai sayap kanan di Polandia pada akhir 2015 mengubah peta politik imigran pemerintah. Partai Keadilan *Law and Justice* atau (*Prawo i Sprawiedliwość, PiS*), yang memiliki total 34% pemilih, telah melakukan beberapa perubahan kebijakan imigrasi. Kelompok ekstremis ini dengan tegas menolak alokasi kuota pengungsi Uni Eropa yang disepakati dalam Perjanjian Lisbon (2007). Apalagi, penolakan terhadap umat Islam yang merantau ke Polandia dari Timur Tengah dan Afrika karena diyakini terkait erat dengan terorisme dan radikalisme. Setelah serangan Paris 2015, membuat adanya kecemasan dan ketegangan dengan kedatangan imigran dari umat islam. Namun, pemerintah Polandia dalam hal ini Dominik Tarczyński dewan parlemen dari *Law and Justice Party* menegaskan bahwa alasan penolakan itu bukan karena agama atau suku, tetapi karena kemauan untuk mempertahankan keamanan nasional (Aljazeera 2019).

Sementara itu, sebagai anggota Uni Eropa, Polandia berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di Uni Eropa, yaitu kesepakatan untuk menerima

kuota jumlah pengungsi. Di luar kuota pengungsi Yunani, pemerintah Uni Eropa mulai memindahkan pengungsi ke negara-negara Eropa lainnya, termasuk Polandia. Ekuitas menurut Art-No. 78 dari Perjanjian Lisbon, yang mengatur *Common European Asylum System* (CEAS), di mana semua anggota Uni Eropa harus secara aktif mendukung program untuk menyamakan jumlah pengungsi di negara mereka sendiri. Pada saat penandatanganan CEAS, kontrak Pemimpin Parlemen Polandia ditempati oleh Partai *Civic Platform* yang liberal dan konservatif, yang meratifikasi kesepakatan tentang kebijakan bersama untuk menangani masalah pengungsi. Solidaritas di tingkat regional Polandia dipertanyakan ketika Polandia melanggar undang-undang yang terdapat di Uni Eropa tentang pengungsi. Mahkamah Agung Uni Eropa mengatakan bahwa negara di mana Polandia, Republik Ceko dan Hungaria telah melanggar hukum pengungsi Eropa, dan setiap negara anggota Uni Eropa harus menerima kembali pengungsi sesuai dengan kuota yang ditetapkan kepada negara-negara anggota Uni Eropa (Rankin 2020).

Pemerintah Polandia beranggapan bahwa Uni Eropa dan badan eksekutifnya, Komisi Eropa, tidak memiliki 'kewajiban perjanjian' untuk memaksa negara-negara anggota yang berdaulat menerima pengungsi ke negara mereka sendiri. Polandia juga menekankan posisi bahwa keputusan untuk menerima pengungsi terletak pada masing-masing negara, bukan Uni Eropa. Pihak berwenang Polandia telah menolak untuk menerima pengungsi, tetapi telah meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Suriah dan bekerja dengan organisasi untuk membantu membangun rumah sakit untuk membantu mereka yang membutuhkan (Radio Poland 2018).

Pada tahun 2018 Polandia melakukan perubahan kebijakan imigrasi dikarenakan adanya isu ketenagakerjaan. Dimana tingkat pengangguran yang di Polandia pada saat itu mengalami penurunan yang jatuh kedalam rekor terendah sejak 1990, hal ini menyebabkan upah yang lebih tinggi dan memicu terjadinya inflasi. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut pemerintah polandia memutuskan untuk membuka akses yang ada perbatasannya, serta memfasilitasi pekerjaan imigran dari luar Uni Eropa. Opsi krusial ini diambil sebagai sebuah langkah untuk mengatasi isu dan permasalahan terhadap pasar tenaga kerja serta perekonomian Polandia secara keseluruhan (Harper 2018).

Isu ini menjadi semakin menarik, jika dianalisis menggunakan perspektif sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. Adanya ancaman keamanan baik itu keamanan tradisional maupun non tradisional, dapat memberikan perubahan preferensi politik di suatu negara secara dinamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu migrasi global merupakan penelitian yang sangat penting untuk dibahas dan dianalisis dalam kajian keamanan global. Studi ini penting karena sensitivitas yang tinggi orang Eropa terhadap imigran telah menyebabkan beberapa konflik sosial di masyarakat. Mengetahui situasi negara dan proses sekuritisasi yang ada dapat membantu untuk memahami mengapa imigran dapat menjadi ancaman bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah Polandia dalam menanggapi krisis imigrasi Eropa melalui analisis teori sekuritisasi. Proses sekuritisasi penting untuk diketahui agar dapat melihat perspektif negara sebagai aktor sekuritisasi dalam membentuk kebijakan domestik dan internasional. Namun, mengklaim kepentingan nasional tidak selalu sejalan dengan keamanan regional dan global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, hal yang perlu dikaji lebih dalam adalah “Bagaimana pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi isu migrasi pasca Krisis Migrasi Eropa pada tahun 2015-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada di poin sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yakni adalah:

Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Polandia melakukan sekuritisasi terhadap isu migrasi pasca krisis migrasi Eropa di kawasan Uni Eropa.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat Polandia sebagai negara anggota Uni Eropa yang tidak berkomitmen sepenuhnya terhadap pemenuhan kuota imigran yang dapat masuk ke negara tersebut. Tentunya ini menjadi perhatian sendiri mengingat Uni Eropa telah berkomitmen untuk menerima pengungsi sesuai jumlah yang telah disesuaikan dalam CEAS dan pemerintah Polandia telah meratifikasi perjanjian tersebut. Selain itu penelitian ini berfokus untuk analisis kebijakan pemerintah Polandia dalam menangani isu imigrasi dalam krisis imigran yang ada di Uni Eropa dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi pada tahun 2015-2018. Batasan penelitian ini nantinya akan dibahas pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2015 diambil karena pada tahun ini merupakan tahun momen terjadinya krisis pengungsi di Eropa yang justru merubah kebijakan imigran Polandia menjadi tertutup. Sedangkan, mengambil batasan 2018 dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang membuka kembali jalur imigrasi Polandia

dengan alasan isu ketenagakerjaan. Dengan linimasa 2015-2018 penelitian ini akan memfokuskan pada pemerintahan Polandia yang berjalan pada saat itu yang dipimpin oleh Andrzej Sebastian Duda sebagai seorang presiden. Untuk itu penelitian ini nantinya akan membahas kebijakan imigran pemerintah Polandia dibawah kepemimpinan Andrzej Duda dengan menggunakan tahapan-tahapan pendekatan sekuritisasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitiannya, Wiecek (2017) yang berjudul *Poland's refugee Policy and Polish Society between Value of Survival and Self Expression* (Wiecek 2017). Berpendapat bahwa masyarakat yang ada di Polandia sebenarnya cukup ramah terhadap turis asing dan dia juga menjelaskan penyebab ataupun alasan yang ada pada masyarakat Polandia dalam melakukan penolakan terhadap imigran diakarenakan adanya faktor homogenitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kultural dan hubungan internasional, Wiecek juga memberikan penjelasan terkait sisi lain dari Polandia dalam memandang imigran. Polandia dulunya merupakan sebuah negara yang terbuka untuk migran, bahkan kelompok muslim Tatar yang ada di Polandia telah diterima dengan baik sejak 700 tahun silam. Polandia sebenarnya tidak anti islam dan Polandia sendiri memiliki "Muslim sendiri", Wiecek dalam penelitiannya menekankan adalah anti migran Muslim adalah migran yang datang dengan data atau dokumen yang tidak lengkap ke Polandia. Polandia juga dianggap tidak sepenuhnya benar menolak pengungsi muslim dilain sisi polandia juga menyusun proyek perdamaian yang ada di Lebanon terkait pengungsi.

Disamping itu, Jaskulowski dalam penelitiannya yang berjudul *The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland* (Krzysztof 2019). Berpendapat latar belakang sejarah mempengaruhi karakter masyarakat yang ada di Polandia sehingga mereka melihat masalah pengungsi sebagai sebuah ancaman nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif keamanan nasional dan keamanan global. Jaskulowski juga menjelaskan secara detail terkait situasi yang sebenarnya ada di Polandia terhadap migrasi, tentang karakter nasionalisme masyarakat Polandia dan islamofobia yang melekat pada mereka. Meskipun demikian, Polandia juga tetap menerima migran dan pengungsi apabila mereka memenuhi persyaratan. Penelitian ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana dilematisnya kebijakan yang ada di Polandia terhadap krisis migrasi antara ketakutan ataupun empati terhadap migran.

Sedangkan Rizky Anandita dkk, dalam penelitiannya yang berjudul *Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi* (Anandita, et al. 2018). Menjelaskan bahwa proses imigrasi dapat menyebabkan insekuritas dikarenakan beberapa faktor antara lain; faktor lingkungan, budaya dan identitas, pendidikan, adanya asumsi “Trojan Horse”, dan adanya ketidakpuasaan masyarakat lokal. Menurutnya, terdapat terminologi dalam isu migrasi yang mana tidak selamanya berkaitan dengan isu keamanan dan juga mengenai hubungan internasional. Migrasi dapat dikatakan bagian dari isu keamanan apabila migrasi tersebut dipandang sebagai sebuah resiko. Adapun dampak positif adanya migrasi yang jika dilihat dari studi kasus ketenagakerjaan yang ada di Polandia, dimana negara maju membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja kasar. Dengan begitu adanya migran dapat memenuhi

ataupun menjadi solusi untuk kebutuhan tersebut. Migrasi dianggap bukanlah isu keamanan namun menjadi isu keamanan dikarenakan mengalami politisasi sehingga menjadi isu keamanan. Adanya proses politisasi tersebut yang menimbulkan dinamika keamanan Polandia, dimana urgensi imigran dianggap tertantang dengan sekuritisasi migran.

Literatur-literatur di atas telah membahas mengenai kebijakan isu imigrasi di Polandia. Berbagai literatur tersebut akan menjadi pedoman untuk menulis penelitian kebijakan Polandia terkait Isu imigrasi pasca krisis Migran di Uni Eropa. Pada penelitian ini juga akan berbeda dengan literatur-literatur yang sudah ada karena penelitian ini nantinya akan lebih berfokus dalam melihat proses sekuritisasi dalam kebijakan Polandia terkait Isu Imigran pasca Krisis Migran di Uni Eropa. Melalui perspektif sekuritisasi, penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi Polandia melakukan kebijakan sekuritisasi terhadap isu migrasi pasca krisis migran di Uni eropa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep sekuritisasi yang diusung oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998). Sekuritisasi didefinisikan sebagai pengidentifikasian isu tertentu, baik politik ataupun non-politik, sebagai agenda keamanan (Buzan, Waever and de Wilde 1998, 23). Dalam menentukan sekuritisasi, terdapat tiga unit yang diperlukan dalam analisis, yaitu obyek referensi, aktor sekuritisasi, dan aktor fungsional.

Obyek referensi merupakan hal yang *terlihat* terancam dan memiliki legitimasi untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, obyek referensi merupakan sesuatu yang harus dipertahankan sehingga aktor perlu untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu. Secara tradisional, obyek referensi dalam keamanan adalah negara ataupun bangsa. Namun, aktor sekuritisasi dalam hal ini dapat mengonstruksi obyek apapun sebagai obyek referensi. Untuk dapat dikatakan sebagai obyek referensi, obyek harus memiliki legitimasi keamanan yang mendorong aktor untuk mempertahankan survivabilitas obyek tersebut (Buzan, Waever and de Wilde 1998, 39).

Aktor sekuritisasi adalah pihak yang mendeklarasikan bahwa obyek referensi berada dalam posisi yang terancam. Umumnya, aktor sekuritisasi merupakan pemimpin politik, pemerintah, dan kelompok oposisi yang berbicara atas nama negara. Dalam implementasinya, tidak penting siapa yang menjalankan aktivitas sekuritisasi, karena aktor sekuritisasi ditentukan berdasarkan siapa yang *menyatakan* obyek sebagai obyek referensi (Buzan, Waever and de Wilde 1998, 41).

Aktor fungsional merupakan aktor yang memengaruhi dinamika dari obyek referensi dan aktor sekuritisasi, tetapi tidak termasuk ke dalam dua unit tersebut. Suatu isu memiliki aktor fungsional yang berbeda-beda tergantung pada sektornya. Misalnya, dalam sektor militer, aktor fungsional bisa saja merupakan birokrasi pertahanan, industri persenjataan, bahkan penyedia pasukan militer sewaan. Dalam sektor sosial, media berperan penting dalam menentukan situasi yang ada, seperti menyatakan siapa saja yang terlibat dan apa yang dibahas dalam suatu isu (Buzan, Waever and de Wilde 1998, 124).

Untuk dapat dikatakan berhasil, sekuritisasi memiliki tiga komponen atau tahapan, yaitu ancaman eksistensial, tindakan darurat, dan dampaknya terhadap hubungan antarunit karena adanya pelanggaran prosedur politik normal (Buzan,

Waever and de Wilde 1998, 26). Oleh karena itu, kriteria dari keberhasilan sekuritisasi adalah adanya pembentukan ancaman eksistensial yang memiliki dampak politik yang cukup besar. Jika aktor sekuritisasi berhasil bertindak di luar prosedur politik yang seharusnya dengan memanfaatkan narasi terkait prioritas dan kedaruratan ancaman eksistensial, kondisi tersebut dapat dilihat sebagai sekuritisasi.

Upaya sekuritisasi dapat mengganggu hubungan antarunit, yaitu aktor sekuritisasi dan audiens, yang terjadi dalam isu keamanan. Misalnya, dalam mengambil keputusan, aktor umumnya bergerak berdasarkan persetujuan dari audiens untuk memperoleh legitimasi atas keputusannya. Namun, dalam situasi sekuritisasi, aktor dapat mengambil keputusan secara mandiri dengan alasan bahwa keputusan tersebut harus dilakukan demi melindungi obyek referensi dari ancaman. Pada upaya sekuritisasi, negara dapat melangkahi prosedur sosial tersebut dengan narasi bahwa isu keamanan tertentu tidak bisa diatasi dengan cara yang normal (Buzan, Waever and de Wilde 1998, 26).

Dalam konsep sekuritisasi sendiri, terdapat beberapa indikator, seperti ancaman eksistensial atau *existential threat*, pernyataan atau *speech act*, serta tindakan darurat atau *emergency act*.

Existential threat sendiri dapat dipahami dalam kaitannya dengan karkter khusus dari objek yang dimaksud sehingga tidak terpaku pada standar universal terkait apa yang dapat mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, *existential threat* sendiri memiliki pengertian yang berbeda untuk berbagai sektor. Dalam perspektif militer, *existential threat* merujuk pada negara atau entitas politik yang dapat mengancam eksistensi dari angkatan bersenjata. Sementara, di sektor politik,

existential threat dapat didefinisikan dalam hal kedaulatan maupun ideologi negara, yang mana kedaulatan dapat terancam secara eksistensial oleh apa pun yang mempertanyakan pengakuan, legitimasi, atau otoritas pemerintahan (Buzan, Waever dan de Wilde 1998, 22).

Sementara, *speech act* sendiri dapat dipahami sebagai suatu proses dalam membangun pemahaman bersama tentang apa yang harus dilihat, dipertimbangkan, hingga direspons bersama sebagai suatu tindakan kolektif sebagai suatu ancaman (Buzan, Waever dan de Wilde 1998, 26). *Speech act* sendiri pada dasarnya dinyatakan oleh aktor sekuritisasi, baik negara, pemimpin negara, atau otorita tertentu, yang mana pernyataan tersebut diterima oleh masyarakat secara luas dan berbagi pemahaman yang sama terkait ancaman yang ada.

Selanjutnya, *emergency act* sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi *existential threats* yang ada, yang mana, tindakan ini dijustifikasi apabila melewati batasan peraturan maupun kewajaran dari prosedur normal pada umumnya (Buzan, Waever dan de Wilde 1998, 24). Umumnya, *emergency act* ini didorong dan didukung oleh aktor sekuritisasi yang merasa ada ancaman sehingga diperlukan tindakan untuk mengeliminasi ancaman tersebut.

Dalam penelitian ini, konsep sekuritisasi digunakan untuk menganalisis sikap pemerintah Polandia terhadap isu imigran yang terjadi di Eropa. Pemerintah Polandia dinilai telah melakukan sekuritisasi terhadap isu imigran yang semula merupakan permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan pengungsi, menjadi permasalahan yang dianggap mengancam keamanan nasional.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, pemerintah Polandia berperan sebagai aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa arus imigran yang masuk ke Eropa, khususnya Polandia, merupakan isu keamanan yang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, isu imigran di Polandia dipandang sebagai ancaman eksistensial yang harus segera diatasi untuk menghindari pengaruh negatif yang mungkin muncul. Alasan keamanan tersebut yang selanjutnya menjadi justifikasi mengapa pemerintah Polandia mengambil kebijakan tertentu terkait imigran, Untuk itu, pemerintah Polandia melalui Partai *Law and Justice* yang memiliki pandangan sayap kanan berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang mereka anggap paling tepat untuk menghindari ancaman eksistensial tersebut, termasuk di antaranya dengan menolak kebijakan Uni Eropa untuk menerima imigran dalam kuota tertentu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif yang nantinya temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian (Sugiono 2007, #). Dalam penggambarannya penelitian ini akan memaparkan kebijakan migran Polandia sebagai sekuritisasi di Uni Eropa terhadap pengungsi yang terjadi di regional Uni Eropa.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah pemerintahan Polandia yang berjalan pada saat itu yang dipimpin oleh Andrzej Sebastian Duda

sebagai seorang presiden. Sedangkan, untuk objek penelitian ini tertuju pada perubahan kebijakan migran pemerintahan Polandia tahun 2015-2018.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder sebagai sebuah sumber data yang digunakan. Data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data berbasis dokumen dan berbasis internet. Berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan maka pada penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari Uni Eropa serta artikel yang ada di internet berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah proses pengumpulan data, kemudian data yang dikumpulkan akan dilanjutkan sebagai bahan analisis. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencatat ide-ide yang muncul setelah membaca seluruh data yang telah dipahami. Selanjutnya, adalah melakukan pembagian subtopik terhadap data-data yang telah selesai dikumpulkan. Setelah proses pembagian subtopik dilakukan, kemudian melakukan pengembangan narasi atau deskripsi berdasarkan subtopik yang akan dibahas. Terakhir, menuliskan secara deskripsi serta melakukan penafsiran terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan Bab 1 yang memaparkan latar belakang yang berkaitan dengan topik penelitian yakni kebijakan migrasi Polandia pasca krisis migran di Uni Eropa, lalu dapat ditarik sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dalam

penelitian ini direlevansikan dengan teori Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional, metode penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari beberapa referensi seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber internet lainnya. terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan. Kemudian Bab 2 nantinya akan membahas sejarah dan dinamika yang berkaitan dengan kebijakan migrasi Polandia. Dilanjutkan Bab 3 yakni mengelaborasi teori kedalam studi kasus yang ada. Setelah itu, dilanjutkan pada Bab 4 yang berisi Kesimpulan dari penelitian ini.

BAB 2

ISU IMIGRASI DI POLANDIA DAN DINAMIKA KRISIS IMIGRAN DI UNI EROPA TAHUN 2015

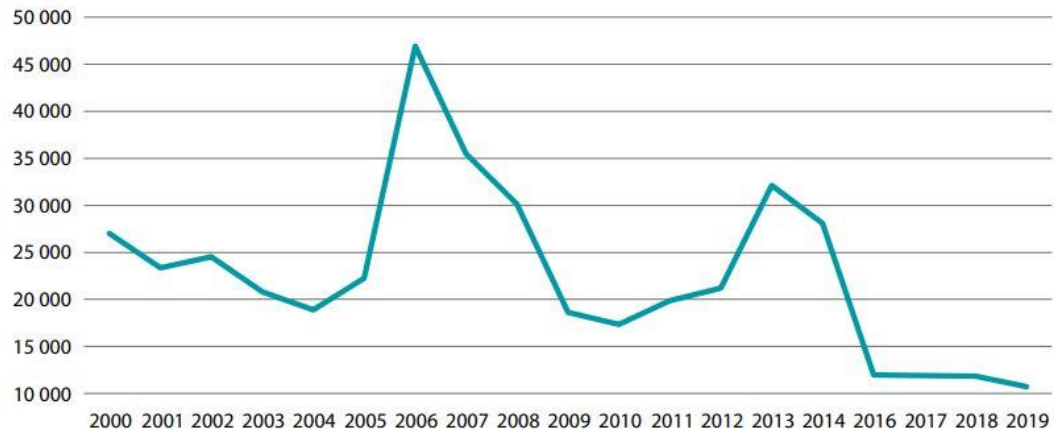
2.1 Imigrasi di Polandia

2.1.1 Isu Imigrasi di Polandia Sebelum Tahun 2015

Isu imigrasi merupakan isu yang cukup baru di Polandia karena negara tersebut sebelumnya tidak dianggap sebagai negara yang menarik sebagai tujuan imigran, terlebih sebelum tahun 2015 ketika terjadi krisis imigran di Eropa. Hal tersebut karena perekonomian Polandia yang dinilai tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sedangkan imigrasi umumnya terjadi karena adanya kebutuhan untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, pemerintah Polandia memiliki kebijakan yang menyulitkan untuk dilakukannya imigrasi demi mengimbangi kebijakan kebebasan perpindahan yang diterapkan oleh Uni Eropa (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010). Karenanya, imigrasi ke Polandia bukan merupakan hal yang populer pada tahun 2000-an.

Polandia sendiri merupakan negara yang didominasi oleh emigrasi, dengan sebagian besar perpindahan manusia terjadi dari Polandia ke negara lain, khususnya pada periode tahun 2004-2007 (Szylo-Skoczny and Duszczyk 2020, 14). Peningkatan emigrasi yang signifikan dinilai didasari oleh bergabungnya Polandia ke Uni Eropa pada tahun 2004 yang memberikan kebebasan bagi warga negara Polandia untuk berpindah ke negara-negara lain di Uni Eropa (Kostrzewa, et al. 2020, 77). Akan tetapi, sejak tahun 2015, emigrasi dari Polandia mengalami tren penurunan drastis hingga tahun 2019.

Grafik 1 Jumlah Emigrasi Permanen dari Polandia Tahun 2000-2019



Ze względu na niedostateczną jakość dane za 2015 r. nie są publikowane.
Due to insufficient quality the data for 2015 are not published.

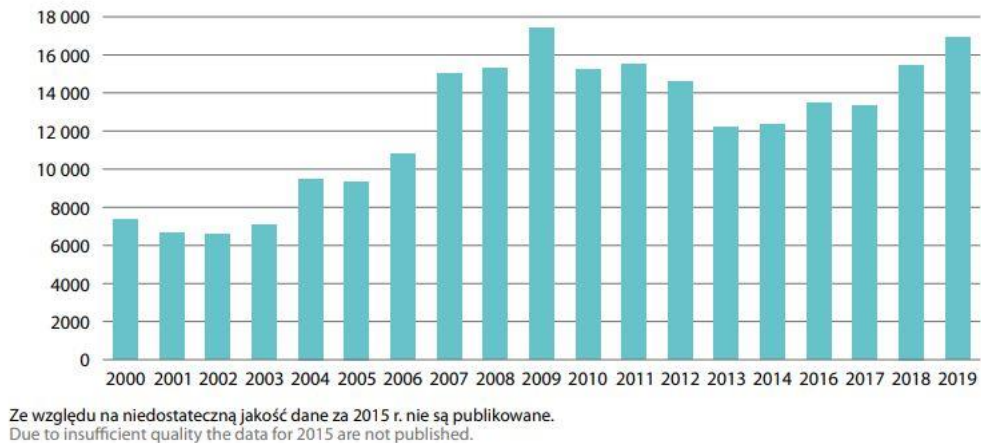
Sumber: Kostrzewa, et al. (2020, 77)

Tidak populernya tren imigrasi di Polandia membuat populasi imigran di negara tersebut terbilang sedikit, yaitu hanya lebih dari 92.000 orang atau 0,24% dari total populasi Polandia. Namun, sejak tahun 2009, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Polandia berkembang menjadi negara tujuan bagi imigrasi. Salah satu faktor pendorong kondisi tersebut adalah ekonomi Polandia yang dinilai masih stabil setelah terjadinya krisis ekonomi skala besar pada tahun 2008. Kondisi itu mendorong warga negara Polandia yang berada di luar negeri untuk berimigrasi kembali ke Polandia (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah imigran, yang mana pada tahun 2002, jumlah imigran ke Polandia berkisar antara 6.600 orang yang selanjutnya melonjak menjadi 17.400 orang pada tahun 2009. Sebagian besar imigrasi dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya merupakan warga negara Polandia yang kemudian kembali ke Polandia. Di samping itu, sebagian besar lainnya merupakan keturunan Polandia yang lahir di luar negeri dan memutuskan untuk tinggal di Polandia. Dengan kata lain, 90% imigrasi yang terjadi pada periode

tersebut dilakukan oleh orang Polandia sendiri. Akan tetapi, sejak tahun 2011, terdapat perubahan tren dimana sebagian besar imigran yang masuk ke Polandia merupakan tenaga kerja asing, membuat porsi orang Polandia dalam imigrasi berkurang hingga 70% (Kostrzewa, et al. 2020, 112).

Grafik 2 Imigrasi Permanen ke Polandia Tahun 2000-2019



Sumber: Kostrzewa, et al. (2020, 112).

Peningkatan jumlah imigran didasari oleh beberapa faktor, seperti bergabungnya Polandia ke Uni Eropa yang membuat persepsi masyarakat asing terhadap Polandia pun semakin baik, tidak hanya sebagai negara transit, tetapi juga sebagai tempat tinggal, studi, dan pekerjaan. Hal tersebut didukung pula oleh mekanisme Schengen yang memberi kebebasan bagi warga negara asing untuk keluar-masuk Polandia dengan tujuan apapun. Di samping itu, emigrasi yang sebelumnya terjadi juga memunculkan kondisi kurangnya tenaga kerja di Polandia, khususnya di sektor informasi dan teknologi, yang selanjutnya mendorong imigrasi tenaga kerja ke Polandia (Kostrzewa, et al. 2020, 112).

Sebagian besar imigran yang memasuki wilayah Polandia berasal dari Jerman. Hal tersebut karena Jerman juga sebelumnya merupakan negara tujuan emigrasi dari Polandia. Dengan kata lain, karena sebagian besar imigran yang

masuk ke Polandia merupakan warga Polandia yang tinggal di luar negeri, negara asal imigrasi dapat dilihat dari negara tujuan emigrasi di tahun-tahun sebelumnya. Di samping Jerman, mayoritas imigran berasal dari negara-negara Eropa lainnya, seperti Perancis, Inggris, Italia, dan Austria (Kostrzewa, et al. 2020, 113).

Dari luar Eropa, sebagian besar imigran berasal dari Ukraina, dimana imigran asal Ukraina merupakan komunitas terbesar yang mendapatkan izin tinggal sementara di Polandia. Di samping itu, imigran dari Tiongkok juga memiliki porsi yang besar pada populasi imigran di Polandia. Hal tersebut karena potensi pasar yang dimiliki oleh Polandia yang mendorong perusahaan Tiongkok untuk melakukan investasi di negara tersebut. Sebaliknya, perusahaan Polandia juga membutuhkan tenaga kerja dari Tiongkok yang upahnya lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja lokal (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Dalam menghadapi peningkatan jumlah imigran di negaranya, masyarakat Polandia sendiri memiliki respons positif terhadap imigran, diperkirakan karena Polandia merupakan negara dengan tingkat emigrasi yang tinggi ke negara-negara lain. Pada tahun 2002-2012, Polandia menjadi salah satu negara dengan pandangan paling pro-imigran di Uni Eropa. Bahkan, pada tahun 2014, sebanyak 63,4% masyarakat Polandia menyatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk menerima status pengungsi yang diajukan oleh imigran. Polandia juga memiliki sikap positif terhadap imigran, yang mana sebagian besar masyarakat Polandia tidak mempermasalahkan adanya imigran atau komunitas ras lain di sekitar mereka (Bachman 2016).

Akan tetapi, respons positif tersebut tidak diberikan kepada komunitas imigran muslim di Polandia. Pada tahun 2014, survei dari European Social Survey

menyatakan bahwa 34,3% masyarakat Polandia menolak kedatangan imigran muslim di negaranya. Hal tersebut berkaitan dengan identitas Katolik yang kuat di Polandia. Di samping itu, sebanyak 43% responden juga menyatakan bahwa dengan adanya imigran, jumlah pekerjaan yang didapatkan oleh penduduk lokal menjadi lebih sedikit karena keterlibatan imigran dalam angkatan kerja Polandia (Bachman 2016).

Setidaknya, terdapat 188.000 imigran yang terdaftar secara resmi di Polandia, yang mana sebagian besar dari mereka berasal dari Ukraina, Belarusia, Tiongkok, dan Vietnam. Pada tahun 2015, Uni Eropa mengalami krisis imigran yang juga berdampak pada jumlah imigran yang diterima oleh Polandia, yang mana di tahun tersebut, Polandia menerima permohonan suaka dari 6.720 pengungsi yang mayoritas berasal dari Ukraina dan Chechens. Di samping itu, banyak pula pengungsi dari Timur Tengah yang masuk ke Polandia akibat konflik sipil yang terjadi di wilayah tersebut (Porter-Szücs 2015).

Menanggapi krisis imigran tersebut, Polandia semula memutuskan untuk menyetujui program Uni Eropa dan menerima 7.082 pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun, keputusan tersebut mengalami penolakan dari politisi ataupun masyarakat secara luas. Politik Polandia yang didominasi oleh kelompok sayap kanan menolak masuknya imigran, khususnya pengungsi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat pun dinilai tidak terbiasa dengan perannya sebagai 'pemberi suaka', melihat histori Polandia sebagai negara yang diliputi kemalangan dan justru bergantung pada bantuan negara lain (Porter-Szücs 2015).

2.1.2 Kebijakan Imigrasi Polandia Sebelum Tahun 2015

Kebijakan imigrasi Polandia pada masa-masa awal kejatuhan Uni Soviet dapat dilihat dari ketidakmampuan negara tersebut dalam menangani imigrasi yang terjadi di negaranya. Hal tersebut karena Polandia, sebagai negara unilateral, tidak memiliki pengalaman dan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi individu yang ingin keluar dari dan masuk ke Polandia. Pemerintah juga tidak memiliki dana yang cukup untuk membentuk institusi khusus bagi migrasi. Pada periode tersebut, satu-satunya regulasi yang membahas tentang migrasi adalah *Aliens Act 1963* yang mengatur tentang warga negara asing yang keluar-masuk Polandia (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Selain dari perpecahan Uni Soviet, kebijakan imigrasi Polandia pada tahun 1990-an juga dipengaruhi oleh tujuan Polandia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, kebijakan imigrasi Polandia pada saat itu terfokus pada migrasi yang berkaitan dengan pencari suaka ataupun perpindahan dari negara yang berbatasan langsung dengan Polandia, sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh Uni Eropa. Akibatnya, kebijakan terkait migrasi resmi ataupun integrasi pasca migrasi tidak menjadi fokus dari pemerintah Polandia (MPC, Polish response to the refugee crisis: where the wild things are? 2015).

Pada tahun 1997, Polandia mengamandemen *Aliens Act* yang juga mengatur tentang kondisi masuk, tinggal, dan transit dari warga negara asing di Polandia. Pemerintah Polandia kembali mengeluarkan *Aliens Act* yang lebih komprehensif pada tahun 2001, dengan salah satu hasilnya adalah pembentukan Kantor Repatriasi dan Warga Negara Asing sebagai institusi pertama yang secara khusus mengurus tentang isu imigrasi. Di tahun yang sama, Polandia mengeluarkan *Repatriation Act*

yang mengatur tentang masuknya etnis ataupun keturunan Polandia ke negara tersebut. Dengan adanya *Repatriation Act*, imigran dapat lebih mudah mendapatkan bantuan dan izin tinggal berdasarkan kesamaan kultural (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Kebijakan imigrasi Polandia sejak tahun 2007 terfokus pada upaya untuk menarik kembali warga negara Polandia yang sebelumnya telah melakukan emigrasi. Misalnya pada tahun 2007, pemerintahan Donald Tusk melakukan kampanye yang bertujuan untuk menarik imigran Polandia karena rendahnya jumlah tenaga kerja dan meningkatnya populasi usia tua di negara tersebut. Berdasarkan dengan kampanye tersebut, pemerintah Polandia mengeluarkan *Tax Abolition Act* pada tahun 2008 yang mengatur tentang pemberian kembali pajak yang telah dibayarkan oleh tenaga kerja Polandia di luar negeri pada kurun waktu tahun 2002-2007. Polandia juga mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak ganda yang sebelumnya dibebankan kepada tenaga kerja Polandia di luar negeri (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Di sisi lain, keterbatasan tenaga kerja lokal di Polandia juga mendorong pemerintah Polandia, yang saat itu dipimpin oleh partai sayap kanan, untuk membuka perbatasan bagi tenaga kerja dari wilayah Eropa Timur, seperti Ukraina, Belarus, dan Rusia. Pada periode ini, tidak tampak penolakan dari masyarakat ataupun kelompok politik terhadap kebijakan pemerintah untuk membuka perbatasannya (MPC, Polish response to the refugee crisis: where the wild things are? 2015). Kebijakan itu selanjutnya dilakukan dengan memberikan izin kerja selama tiga bulan terkhusus di sektor agrikultur. Pada tahun 2007, program tersebut diperluas ke seluruh sektor ekonomi di Polandia. Berdasarkan kebijakan itu, tenaga

kerja asing dapat secara bebas memasuki Polandia selama mereka memiliki *declaration of intent* yang diajukan oleh pemberi kerja kepada pemerintah Polandia (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Pemerintah Polandia juga mempermudah proses masuknya tenaga kerja asing non-Uni Eropa ke Polandia. Hal tersebut dilakukan melalui penyederhanaan proses pengajuan izin kerja, baik bagi pemberi kerja ataupun tenaga kerja asing, dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu diserahkan kepada pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, jumlah izin kerja bagi tenaga asing di Polandia pun meningkat pesat, dari semula 18.022 perizinan pada tahun 2008, menjadi 29.340 perizinan pada tahun 2009. Kondisi itu menunjukkan adanya peningkatan masuknya imigran dalam bentuk tenaga kerja asing ke Polandia (Iglicka and Ziolk-Skrzypczak 2010).

Dapat dilihat bahwa secara garis besar, kebijakan imigrasi Polandia pada periode sebelum tahun 2015 terfokus pada upaya untuk menarik tenaga kerja asing ke Polandia demi mengisi permintaan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja di negara tersebut. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan imigrasi Polandia sehingga masuknya imigran dalam jumlah besar tidak berpengaruh negatif terhadap penduduk lokal, khususnya bagi angkatan kerja lokal.

2.2 Krisis Imigran di Eropa Tahun 2015-2018

2.2.1 Dinamika Krisis Imigran di Eropa Tahun 2015-2018

Migrasi internasional merupakan salah satu isu yang banyak terjadi sejak berlangsungnya *Arab Spring* pada tahun 2011. Sejak itu, sebagian besar imigran dari Arab memasuki negara-negara Uni Eropa melalui Malta dan Italia. UNHCR

menyatakan bahwa setiap tahunnya, terdapat ratusan ribu imigran yang memasuki Uni Eropa (Potyrała 2016, 76). Sejak itu pula, alur migrasi ke Uni Eropa pun semakin meningkat, didukung oleh terjadinya konflik sipil di Suriah, Irak, dan Libya, serta kekerasan yang terjadi di beberapa negara di Afrika.

Pada akhir tahun 2014, Uni Eropa menghadapi lonjakan permohonan suaka sebesar 44%, atau yang semula sekitar 435.000 permohonan pada tahun 2013 menjadi 626.000 permohonan pada tahun 2014. Dari permohonan tersebut, sebagian besar berasal dari pengungsi Suriah yang juga mengalami peningkatan signifikan di Uni Eropa, yang semula sejumlah 50.000 orang di tahun 2013 menjadi 123.000 orang di tahun 2014. Mayoritas pengungsi mengajukan permohonan suaka ke Jerman, atau sebesar 32% dari total pengungsi yang masuk ke Uni Eropa (Eurostat 2015).

Isu imigran di Uni Eropa mulai dianggap sebagai krisis ketika pada tahun 2015, jumlah pengungsi yang memasuki wilayah Uni Eropa mencapai lebih dari satu juta orang. Pada 29 Desember 2015, UNHCR menyatakan bahwa terdapat 1.000.573 pengungsi yang memasuki Eropa melalui jalur Mediterania, dengan 3.735 pengungsi lainnya dinyatakan hilang. Di sisi lain, sebanyak 34.000 pengungsi lainnya juga memasuki Eropa melalui jalur darat dengan melewati Turki (Clayton and Holland 2015). Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak krisis imigran akibat Perang Yugoslavia pada tahun 1992 (Eurostat 2015). Sebagian besar imigran tersebut merupakan pengungsi yang datang akibat konflik kekerasan domestik yang terjadi di negara asal mereka, dengan pengungsi terbanyak berasal dari Suriah.

Pada awal tahun 2016, arus imigran yang masuk ke Uni Eropa dinilai tidak berkurang, dimana pada bulan Januari, jumlah imigran yang mengajukan

permohonan suaka ke Jerman saja mencapai 52.000 orang. Di sisi lain, terdapat 65.000 imigran yang masuk melalui jalur laut ke Yunani dan Italia, peningkatan tajam dibandingkan sebelumnya, yakni 5.550 imigran pada Januari 2015 (de Lima, et al. 2016, 15).

Hingga tahun 2018, permasalahan imigran di Uni Eropa masih belum menemukan titik terang. Pada tahun 2018, Uni Eropa menerima setidaknya 102.882 pengungsi yang terpusat di Italia, Spanyol, Yunani, dan Malta. Angka tersebut merupakan angka yang sedikit jika dibandingkan pada puncak isu imigran pada tahun 2015-2016 (Henley 2018). Penurunan jumlah pengungsi tersebut didukung oleh perjanjian antara Uni Eropa dan Turki, pemasangan pagar perbatasan di negara-negara Balkan, serta perjanjian bilateral antara Italia dan Libya di tahun 2017. Namun, dengan adanya upaya tersebut pun, pengungsi masih berusaha memasuki wilayah Eropa untuk mencari suaka.

2.2.2 Respons Uni Eropa terhadap Krisis Imigran Tahun 2015-2018

Berdasarkan jumlah permohonan suaka yang diajukan oleh pengungsi, beberapa negara di Eropa mengalami kesulitan dalam menghadapi arus masuk imigran di negaranya. Misalnya di Hungaria, jumlah permohonan suaka mencapai 1.800 permohonan dan di Swedia mencapai 1.667 permohonan dari 100.000 populasi lokal. Walaupun Jerman dan Inggris merupakan negara dengan penerimaan imigran terbanyak, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah populasi lokal, permohonan suaka di Jerman hanya 587 pengungsi sedangkan di Inggris hanya 60 pengungsi. Rata-rata jumlah permohonan suaka di Uni Eropa adalah 260 pengungsi (BBC, Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts 2016).

European Commission selanjutnya membentuk sistem distribusi migran kepada negara-negara anggotanya, dimana setiap migran yang masuk ke wilayah Uni Eropa akan secara otomatis didistribusikan ke negara-negara lain sesuai kuota yang telah ditentukan. Sistem tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu relokasi yang menyatakan bahwa migran yang ‘secara jelas membutuhkan perlindungan internasional’ akan dipindahkan ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dan perpindahan (*resettlement*) yang menyatakan bahwa migran yang ‘secara jelas membutuhkan perlindungan internasional’ akan dipindahkan dari negara dunia ketiga dengan bantuan dari UNHCR (European Commission 2015).

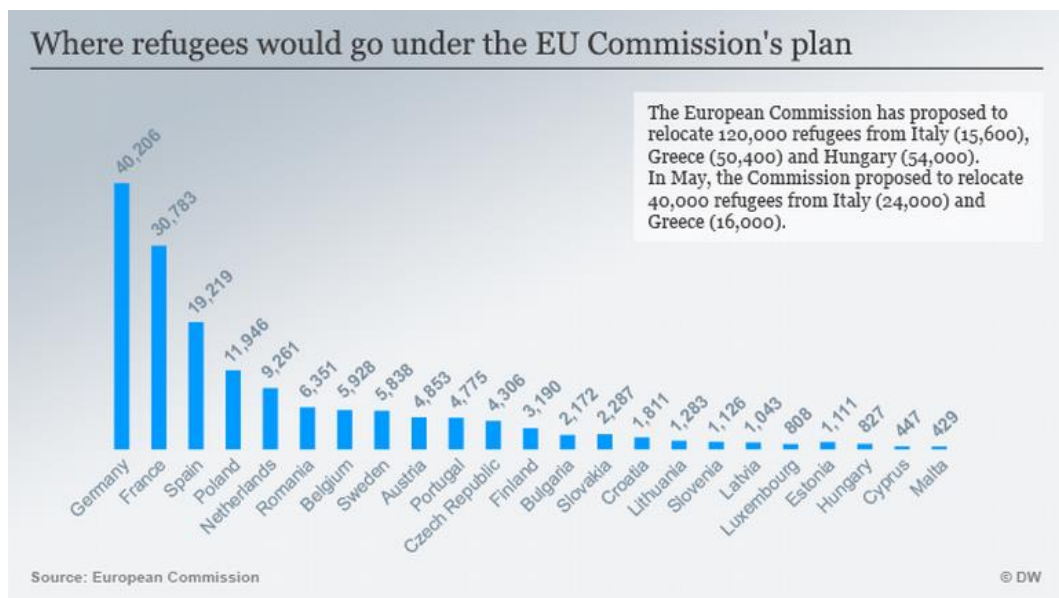
Sistem distribusi imigran Uni Eropa memiliki empat kriteria utama untuk menetapkan apakah negara-negara Eropa mendapatkan kuota untuk distribusi imigran. Kriteria tersebut adalah (1) jumlah populasi yang melihat apakah negara masih bisa menerima imigran dalam jumlah besar atau tidak; (2) total GDP yang menunjukkan kekayaan atau kemampuan negara untuk menerima dan mengintegrasikan imigran; (3) jumlah permohonan pengungsi di negara penerima pada periode tahun 2010-2014; serta (4) tingkat pengangguran yang menunjukkan kemampuan negara untuk membantu pengungsi secara ekonomi (European Commission 2015).

Berdasarkan sistem tersebut, Uni Eropa setuju untuk merelokasikan 160.000 pengungsi dari Italia dan Yunani ke negara-negara Eropa lainnya, sementara dari Hungaria, hanya 54.000 pengungsi yang akan dipindahkan sebagai bentuk kebijakan pemerintah Hungaria untuk menerima migran dalam jumlah besar (BBC, *Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts 2016*). Di samping itu, masing-masing negara juga mendapatkan kuota relokasi yang berbeda,

tergantung pada kapasitas negara untuk menerima imigran dan membantu proses integrasi.

Uni Eropa pun mengimplementasikan sistem tersebut dengan rencana mendistribusikan puluhan ribu imigran. Bagi negara yang menerima migran, negara tersebut akan menerima bantuan dana sebesar 6.000 euro per migran untuk membantu proses relokasi (Potyrala 2016, 81).

Gambar 1 Kuota Migran Berdasarkan Skema Distribusi Uni Eropa



Sumber: DW (2015)

Kebijakan terbuka terhadap pengungsi membuat Uni Eropa menjadi sasaran pergerakan imigran. Dampak negatifnya termasuk kecelakaan di jalur laut, perselisihan di perbatasan Uni Eropa, wilayah Schengen, dan barak pengungsi. Beban bertambah bagi penduduk lokal dan munculnya debat tentang perlunya tetap menerapkan "*welcoming culture*" terhadap pengungsi. Ini dianggap sebagai krisis oleh politik dan media karena ketidaksiapan Eropa menghadapi imigran besar-besaran (Ritter, et al. 2017).

Permasalahan imigrasi di kawasan Uni Eropa semakin membesar ketika perselisihan muncul antara negara-negara anggota Uni Eropa. Negara yang menolak penerapan sistem tersebut, yakni Hungaria, Republik Ceko, Rumania, dan Slovakia, menyatakan keputusannya untuk tidak menerima pengungsi dari kuota distribusi Uni Eropa sama sekali (Traynor 2015). Bahkan, beberapa negara seperti Hungaria menyebut Uni Eropa hanya ingin ‘membangjiri Hungaria dengan imigran’ dan menolak untuk menerima pengungsi dalam jangka panjang (Birnbbaum and Witte 2015). Hal itu menyebabkan pemerintah tidak memiliki kebijakan yang ramah terhadap pengungsi, dilihat dari tidak adanya barak pengungsi yang layak, yang selanjutnya mendorong pengungsi untuk berpindah ke negara lain.

Kekacauan administratif di Eropa yang terjadi dalam pendataan pengungsi, mendorong Jerman untuk mengirimkan kembali pengungsi di Jerman yang telah mendaftarkan diri di negara lain (Holehouse 2015). Namun, tidak lama setelahnya, Jerman, bersamaan dengan Austria, juga membuka perbatasannya untuk pengungsi yang berpindah dari Hungaria. Akan tetapi, perselisihan mulai terjadi di wilayah perbatasan karena jumlah permohonan suaka yang terlalu banyak, sehingga Jerman menerapkan kebijakan untuk menutup perbatasannya. Hal itu membuat Austria menjadi negara tujuan utama bagi pengungsi yang seharusnya memasuki wilayah Jerman (Chan and Karasz 2015). Kondisi itu pun memaksa Austria untuk juga menutup perbatasannya, yang kemudian memicu reaksi berantai di negara lain, terutama jalur masuk ke Jerman.

Kroasia justru menerapkan kebijakan yang represif untuk mendorong kembali pengungsi ke Hungaria dengan memanfaatkan kekuatan militernya. Hal itu membuat Hungaria dan Kroasia terlibat dalam perselisihan dengan saling

menyalahkan satu sama lain atas isu imigran yang terjadi di antara kedua negara (Kingsley and Graham-Harrison 2015). Di sisi lain, Slovenia, walaupun masih menerima pengungsi, tetapi negara tersebut membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya sehingga dalam upaya untuk menerapkan kebijakan tersebut, kerap terjadi tindak kekerasan antara aparat dan pengungsi. Pemerintah Slovenia juga menuduh aparat kepolisian Kroasia telah membantu pengungsi untuk memasuki perbatasan Kroasia, menyebabkan insiden diplomatik di antara kedua negara (Chicago Tribune 2015).

Negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda justru menyikapi dinamika krisis imigran yang terjadi dengan mengajukan wacana untuk membatasi akses bagi negara anggota Uni Eropa yang menolak keberadaan pengungsi. Di sisi lain, negara-negara Eropa Timur dan Visegrad tetap kukuh pada pendiriannya untuk membatasi maupun menolak masuknya pengungsi (Lehne 2016). Kondisi itu menunjukkan bahwa isu imigrasi yang terjadi di Uni Eropa justru kembali memecah Eropa menjadi dua bagian, yaitu Eropa Timur dan Eropa Barat, yang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap integrasi Uni Eropa di masa mendatang.

Uni Eropa secara tegas meminta negara untuk tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh Uni Eropa dan mendorong masing-masing negara untuk mencari solusi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan imigran, selain dengan menutup perbatasan (RFE/RL 2015). Di sisi lain, arus masuk imigran yang tidak terkendali juga dapat mendorong perluasan pandangan xenophobia dan nasionalis, yang berdampak negatif pada kondisi politik domestik negara (Lehne 2016). Hal itu diperburuk dengan adanya serangan terorisme yang terjadi di Perancis dan Belgia pada tahun 2015 dan 2016 yang membuat tindakan kriminal

dan terorisme cenderung dikaitkan kepada komunitas imigran dari ras dan etnis tertentu. Akibatnya, narasi dan kebijakan anti-migrasi pun mulai diterapkan oleh negara-negara di Eropa untuk mengatasi kekhawatiran akan munculnya ancaman keamanan bagi negara (ENAR 2016, 10).

Isu imigran yang tidak segera teratasi di Uni Eropa mendorong berkembangnya pandangan sayap kanan yang menolak imigrasi ke Eropa. Buruknya, hal tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara yang sejak awal menolak masuknya imigran pada tahun 2015, tetapi juga di Italia, Jerman, dan Austria yang semula menerima pengungsi dalam jumlah besar. Isu imigran pun dimanfaatkan sebagai agenda politik dari pihak-pihak tertentu (Henley 2018).

Contohnya, pada Oktober 2016, pemerintah Hungaria mengadakan kampanye menyatakan bahwa imigran dalam jumlah besar dapat mengancam keamanan karena dianggap kasar, menimbulkan teror dan ketakutan, serta tidak menghormati hukum dan nilai-nilai Eropa. Rumania melalui pernyataan Presiden Traian Basescu yang menyebut imigran, terutama Muslim, sebagai kelompok yang dapat "meledakkan bom secara acak di negara asal mereka" (ENAR 2016, 10-11). Polarisasi politik terkait imigran di Eropa telah memicu diskriminasi terhadap imigran, terutama dari Arab dan Afrika, serta meningkatkan kekerasan antara komunitas lokal dan imigran.

Dengan berkembangnya pandangan anti-imigran, hal itu menunjukkan bahwa Uni Eropa pada dasarnya memiliki ketakutan terhadap masuknya imigran ke wilayah mereka sebagai akibat dari aksi terorisme yang sebelum-sebelumnya terjadi di kawasan tersebut. Hal itu diperburuk dengan pandangan bahwa melalui peningkatan jumlah diaspora non-Eropa di Eropa, negara menganggap bahwa

pengungsi ataupun imigran dari latar belakang budaya non-Eropa pun akan semakin banyak di Eropa. Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisi itu dapat memicu pertumbuhan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia di perbatasan Uni Eropa yang nantinya akan membawa permasalahan keamanan di wilayah tersebut (Lehne 2016).

2.3 Krisis Imigran Eropa di Polandia Tahun 2015-2018

2.3.1 Dinamika Krisis Imigran Eropa di Polandia Tahun 2015-2018

Isu krisis imigran di Eropa pada akhirnya mencapai Polandia pada tahun 2015. Besarnya angka imigran yang mengungsi ke Eropa membuat Uni Eropa menentukan kuota pengungsi yang harus diterima negara-negara anggotanya setelah disesuaikan dengan GDP, populasi, tingkat pengangguran, dan jumlah pengungsi yang mengajukan di negara tersebut.

Salah satu negara yang menolak skema kuota pengungsi ini adalah Polandia, yang mana negara tersebut seketika menolak untuk menerima pengungsi atas dasar apabila pengungsi tersebut hanya bermigrasi karena faktor ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Polandia pada dasarnya menerima pengungsi, tetapi negara tersebut tidak menerima *economic migrants* atau imigran yang datang dengan motif peningkatan ekonomi. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Perdana Menteri Polandia pada saat itu, Ewa Kopacz sebagai landasan untuk menolak kuota pengungsi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, Kopacz juga menyatakan bahwa tanggung jawab utama Polandia adalah memastikan keamanan warga negaranya sehingga dengan tegas menolak proposal kuota pengungsi Uni Eropa tersebut (Potyrała 2016).

Pernyataan Polandia terkait tentang penolakan tersebut mendapat kecaman dari negara anggota Uni Eropa lainnya yang dianggap gagal menunjukkan solidaritas antar negara. Di sisi lain, pemerintah Polandia juga mengeluarkan ancaman untuk keluar dari Uni Eropa atas dasar kepentingan keamanan nasional masyarakatnya. Narasi bahwa keamanan nasional masyarakat Polandia lebih diutamakan dibandingkan pengungsi selalu dibawah oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari warganya. Terlebih, pemerintah Polandia juga menganggap bahwa tidak ada kontradiksi antara peduli terhadap keamanan nasional dengan menawarkan bantuan terhadap pengungsi korban konflik (Potyrała 2016).

Posisi Polandia sedikit melunak dengan pernyataan yang disampaikan pemerintah Polandia bahwa Polandia hanya mau menerima pengungsi yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Selain itu, Polandia juga menawarkan berbagai syarat yang harus dipenuhi Uni Eropa agar negara tersebut dapat menerima pengungsi. Hal ini melahirkan mekanisme bahwa negara yang menerima pengungsi akan menerima 6 ribu euro bagi setiap pengungsi yang diterima untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh *host country* dalam menampung pengungsi tersebut.

Dinamika krisis imigran yang terjadi di Polandia semakin memanas setelah Beata Szydło berpidato dalam peringatan penghormatan terhadap warga Polandia yang menjadi korban kekejaman Auschwitz di Perang Dunia 2, dengan mengatakan jika pemerintah harus melakukan segala cara untuk melindungi warga negaranya, yang mana ini dapat diinterpretasikan sebagai pembelaan diri Polandia atas penolakan untuk mengizinkan pengungsi agar masuk ke negara tersebut. Selain itu, Szydło pada sesi parlemen Polandia juga menyatakan bahwa Uni Eropa gagal untuk

mengatasi ancaman terorisme yang terjadi di beberapa negara di Eropa (Szczerbiak 2017).

2.3.2 *Dampak Imigrasi terhadap Polandia*

Sebelum bergabungnya Polandia dengan Uni Eropa, migrasi dari dan ke Polandia didominasi oleh masyarakat Polandia sendiri yang berpindah ke luar ataupun masuk ke Polandia. Imigrasi dipandang sebagai salah satu strategi untuk bertahan hidup bagi masyarakat Polandia, dimana pendapatan yang dihasilkan dari bekerja di luar negeri berkontribusi terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal Polandia. Diperkirakan, semakin tingginya jumlah tenaga kerja Polandia yang bekerja di luar negeri berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengiriman uang dari luar negeri, yakni dari yang semula sebesar USD 2,28 miliar pada tahun 2003 menjadi USD 6,8 miliar pada tahun 2015, atau 1,3% dari GDP nasional Polandia (World Bank 2016). Faktanya, wilayah dengan tingkat migrasi ke luar Polandia yang tinggi justru menunjukkan keterbelakangan pembangunan karena sebagian besar individu berusia muda dan berpendidikan memilih untuk bekerja di luar negeri (Golinowska and Kocot 2013 dalam White, et al. 2018, 23).

Sebaliknya, imigrasi ke Polandia dinilai memberikan dampak positif, khususnya dalam tingkat nasional. Hal tersebut karena dari segi ekonomi, negara dapat diuntungkan dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Polandia. Pada tahun 2004, jumlah pengangguran di Polandia mencapai 20% dari total tenaga kerja di negara tersebut. Namun, pada tahun 2008, jumlah pengangguran di Polandia hanya 6% dan hingga saat ini tetap rendah, sementara tingkat pertumbuhan pekerja terus meningkat (White, et al. 2018, 29). Hal tersebut dipengaruhi oleh imigran yang bekerja dan mengisi keterbatasan tenaga kerja yang sebelumnya dialami

Polandia karena berkurangnya jumlah angkatan kerja di negara tersebut. Dengan adanya imigran yang terlibat dalam pasar tenaga kerja Polandia, Polandia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, ditandai dengan pertumbuhan GDP yang berada di atas rata-rata Uni Eropa (Duszczek and Matuszczyk 2018).

Di sisi lain, terdapat pula anggapan bahwa masuknya imigran ke Polandia membawa dampak negatif terhadap kondisi ekonomi penduduk lokal dengan adanya kenaikan tingkat ketidakaktifan ekonomi. Ketidakaktifan ekonomi sendiri dilihat sebagai kondisi dimana individu tidak memiliki pekerjaan dalam waktu yang lama. Dalam kondisi dimana terlalu banyak imigran yang masuk sebagai tenaga kerja di Polandia, tenaga kerja lokal akan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Hal itu berdampak negatif terhadap tenaga kerja, termasuk di antaranya adalah berkurangnya kemampuan yang berpengaruh terhadap kesulitan untuk mencari pekerjaan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut selanjutnya menjadi faktor utama dari tingginya tingkat ketidakaktifan ekonomi di Polandia dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, sebaliknya, masuknya imigran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketidakaktifan ekonomi karena posisi pekerjaan tenaga kerja lokal dan imigran berbeda (Duszczek and Matuszczyk 2018).

Selain itu, Imigrasi ke Polandia maupun negara-negara lain di Eropa sendiri justru memberi dampak munculnya rasa terancam yang timbul di tengah masyarakat Polandia, khususnya ketakutan terhadap imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Polandia pada dasarnya merupakan negara dengan pengaruh agama Katolik yang kuat, bahkan menjadi salah satu identitas nasionalnya. Oleh karena itu, masyarakat Polandia memandang jika pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika akan sulit untuk beradaptasi di negara tersebut. Ditambah, aksi terorisme yang

terjadi di beberapa negara dan dilakukan oleh imigran, seperti di Perancis, membuat masyarakat Polandia mengalami kekhawatiran akan keamanannya apabila menerima pengungsi (Morath 2017).

Kekhawatiran tersebut disebabkan karena masyarakat Polandia sendiri memberikan stigma buruk terhadap imigran muslim karena adanya anggapan jika Islam bukanlah agama yang dapat menolerir perbedaan kepercayaan. Kondisi tersebut diperparah dengan aksi teroris yang membunuh seorang warga negara Polandia di Jerman dan kemudian mencuri truk milik perusahaan asal Polandia untuk melakukan aksi teror di Berlin, Jerman (Morath 2017). Tentunya, stereotip tersebut memunculkan sentimen negatif yang cenderung menolak kehadiran pengungsi pada krisis imigran saat itu.

Krisis imigran yang terjadi di Eropa pada tahun 2015-2018 juga menyebabkan meningkatnya isu nasionalisme di Polandia. Hal ini disebabkan karena Polandia khawatir akan kehilangan identitas nasionalnya apabila menerima masuk pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, kampanye PiS di tahun 2015 juga memicu meningkatnya nasionalisme yang berujung pada penolakan masyarakat Polandia terhadap pengungsi (Morath 2017).

2.3.3 Respons Polandia terhadap Krisis Imigran Eropa Tahun 2015-2018

Polandia menolak untuk menerima kuota alokasi sebanyak 160.000 imigran yang masuk ke wilayah Eropa. Hal tersebut dibuktikan pada 11 September 2015, Polandia bersama dengan negara Visegrad lainnya—Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia—menandatangani deklarasi terkait respons terhadap krisis migrasi yang terjadi di Eropa. Dalam deklarasi tersebut, Polandia menolak kebijakan Uni Eropa untuk mendistribusikan pengungsi sesuai dengan kapasitas masing-masing negara.

Polandia sendiri memiliki kewajiban untuk menerima setidaknya 9.287 pengungsi yang direlokasikan dari Hungaria, Italia, dan Yunani (European Commission 2015).

Pemerintah dan elit politik Polandia juga kerap kali menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya imigran dalam jumlah besar ke Polandia (MPC 2015). Bahkan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh institusi penelitian *Kantar* di Polandia, sebanyak 69% masyarakat Polandia menolak untuk menerima imigran yang terjebak di perbatasan Polandia-Belarusia. Masyarakat justru mendukung keputusan pemerintah untuk membangun dinding setinggi 5,5 meter untuk membatasi Polandia dan Belarusia (Lesinska 2021).

Penolakan Polandia terhadap kebijakan Uni Eropa dalam mendistribusikan pengungsi tersebut. Salah satunya disebabkan oleh bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh Polandia dan masyarakatnya di masa lalu. Polandia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang terhadap emigrasi. Masyarakat Polandia terkenal sebagai imigran yang melakukan emigrasi ke berbagai negara barat sejak abad ke-19 hingga dekade 1980-an saat rezim militer berkuasa pada saat itu. Motif dari tingginya gelombang emigrasi di Polandia adalah faktor sosio-ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan pada saat itu (Okolski 1999).

Hingga saat ini, ketergantungan warga negara Polandia terhadap negara maju lainnya untuk menyediakan lapangan besar masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan bahwa imigran asal Polandia di Jerman dan Inggris memiliki kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri dibandingkan negara asalnya. Sementara masyarakat Polandia yang berada di negaranya justru memiliki kemungkinan lebih besar untuk kehilangan mata pencaharian dibandingkan imigran Polandia yang berada di negara lain (Żołędowski 2020).

Alasan lain dibalik penolakan Polandia terhadap kebijakan Uni Eropa adalah berkaitan tentang bagaimana Polandia dan masyarakatnya sudah terbiasa untuk menerima bantuan, bukan sebagai pemberi bantuan. Di tahun 2014 sendiri, Polandia menerima bantuan dari Uni Eropa sebesar 17,436 milyar euro atau sebesar 4.40 persen dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) Polandia (European Union 2016). Sementara, Polandia sendiri berkontribusi terhadap Uni Eropa hanya sebesar 3,5 milyar euro, jauh lebih kecil dari jumlah bantuan yang diterima (European Union 2016).

Masyarakat Polandia juga cenderung terbiasa dalam mendapatkan bantuan, baik secara langsung maupun asistensi. Hal ini terlihat dimana masyarakat Polandia yang menjadi imigran di negara lain mendapatkan asistensi dalam mencari pekerjaan di *host country*. Selain itu, imigran Polandia yang bekerja di Inggris maupun Jerman juga merasakan pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja dibandingkan di negara asalnya sendiri (Żołędowski 2020).

Penegasan penolakan Polandia dalam menerima pengungsi sebagai respons terhadap Krisis Imigran Eropa Tahun 2015-2018 di dasarkan pada anggapan bahwa pengungsi yang masuk ke negara tersebut memiliki risiko keamanan yang tinggi. Pemerintah Polandia bahkan menganggap jika menerima pengungsi yang masuk sama saja dengan menyalakan bom waktu akibat ancaman yang dikhawatirkan. Selain itu, respons pemerintah Polandia yang menolak kebijakan Uni Eropa tersebut juga berlandaskan dari bagaimana masyarakat merespons kehadiran pengungsi di negaranya, yang mana sebagian besar justru tidak ingin menerima pengungsi dari negara-negara Afrika dan Timur Tengah karena mengancam masyarakat Polandia yang homogen (Cienski, Why Poland doesn't want refugees 2017).

Di sisi lain, Polandia juga bukan negara yang memiliki sejarah atau pengalaman dalam menerima imigran. Melihat demografi Polandia yang mayoritas beragama Katolik dan lebih dari 95% memiliki kewarganegaraan asli Polandia. Hal ini membuat mayoritas masyarakat Polandia jarang bersentuhan dengan keberagaman yang ada. Faktor tersebut menyebabkan masyarakat Polandia dengan mudah membentuk stereotip terhadap orang-orang dari bangsa dan negara lain. Diperparah dengan kekhawatiran akan identitas masyarakat Polandia. Faktor tersebut didukung dengan besarnya pengaruh gereja Katolik di Polandia dalam identitas nasional Polandia sehingga menyebabkan narasi akan penolakan imigran pengungsi untuk masuk ke Polandia juga besar (Morath 2017).

BAB 3

SEKURITISASI POLANDIA ATAS ISU IMIGRAN

3.1. Keputusan Polandia dalam Sekuritisasi Isu Imigran

3.1.1. Obyek Referensi

Obyek referensi merupakan hal yang *tampak* menghadapi ancaman dan memiliki keharusan untuk bertahan hidup. Obyek referensi dapat juga dilihat sebagai suatu hal yang harus dipertahankan, yang selanjutnya memberikan legitimasi bagi aktor untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu demi mempertahankan keberlangsungan hal tersebut. Pada praktiknya, aktor dapat mengonstruksi obyek tertentu sebagai obyek referensi. Namun, tidak sembarang obyek dapat dinyatakan sebagai obyek referensi. Untuk dapat disebut sebagai obyek referensi, suatu obyek harus memiliki legitimasi keamanan yang mendorong aktor untuk mempertahankan survivabilitas obyek tersebut (Buzan, Waever and de Wilde 1998). Dalam penelitian ini, obyek referensi yang dinilai menghadapi ancaman adalah Polandia dan warga negaranya.

Polandia merupakan salah satu negara yang paling homogen di Eropa, dengan mayoritas penduduknya berasal dari etnis Polandia dan Katolik Roma. Walaupun demikian, sebelum Perang Dunia II, sebanyak 30% dari masyarakat Polandia berasal dari etnis minoritas, dengan 10% di antaranya beragama Yahudi dan berasal dari Ukraina, Belarusia, dan Jerman (Cienski, Why Poland doesn't want refugees 2017). Akan tetapi, pada tahun 1930-an, Polandia mulai menunjukkan xenofobia dan anti-Semitisme, ditandai dengan dipaksanya penduduk beragama Yahudi ataupun beretnis non-Polandia, khususnya yang berasal dari Jerman, untuk keluar dari negara tersebut. Sebaliknya, etnis asli Polandia yang ada di luar negeri

pun dipaksa untuk kembali ke Polandia. Bahkan, pembersihan etnis melalui jalan kekerasan juga terjadi di Polandia dengan tujuan untuk menciptakan negara Polandia dengan penduduk murni berlatar belakang etnis Polandia, memicu tumbuhnya pandangan nasionalis yang ekstrem (Cienski, Why Poland doesn't want refugees 2017).

Selain itu, demografi Polandia juga dikenal kurang keberagaman akibat dari kurangnya imigran dari luar Polandia yang masuk ke negara tersebut sejak dulu. Jumlah warga negara asing di Polandia hanya sebesar 0,3% di tahun 2015 atau terendah di Uni Eropa. Warga negara asing yang menetap di Polandia pun rata-rata berasal dari negara bekas Uni Soviet, yang mana memiliki beberapa kesamaan kultural dengan Polandia (Ambroziak and Scwhabe 2016).

Kondisi kurangnya diaspora luar di Polandia juga diperparah dengan sulitnya warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan. Salah satu syarat dalam mendapatkan kewarganegaraan Polandia adalah memiliki bukti bahwa warga tersebut memiliki tempat tinggal jangka panjang di Polandia dengan jaminan surat pernyataan dari pemilik properti tempat tinggal tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, yang mana pemilik properti seringkali tidak memberikan surat surat pernyataan tersebut sehingga menyulitkan proses untuk mendapatkan kewarganegaraan tersebut (Sobczak-Szelc, et al. 2020). Hal ini menyebabkan Polandia tidak memiliki sejarah *first-second generation foreigners* yang bermukim di Polandia. Dampaknya adalah minimnya diaspora dari negara lain yang bermukim atau menjadi warga negara Polandia maupun *foreign-born* di Polandia (Ambroziak and Scwhabe 2016) Tentunya ini membuat Polandia minim keberagaman baik secara etnis maupun agama. Akibatnya, Polandia pun menjadi salah satu negara

yang paling homogen, dengan porsi etnis minoritas hanya sebesar 2%, membentuk Polandia menjadi negara mayoritas Katolik-Polandia (MPC 2015).

Hal itu selanjutnya berpengaruh pula terhadap bagaimana Polandia memandang individu dengan latar belakang agama yang berbeda, khususnya Islam. Kasus yang spesifik terjadi pada komunitas Islam karena Polandia tidak memiliki persepsi negatif terhadap komunitas agama lain. Ide yang dimiliki masyarakat Polandia terhadap muslim berasal dari gambaran yang muncul di media-media Barat, misalnya pemberitaan tentang terorisme, kekerasan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh komunitas yang dianggap sebagai muslim di berbagai negara di Eropa. Polandia menganggap muslim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, berbeda dengan bagaimana mereka memandang pengungsi dari wilayah eks-Soviet, seperti Chechnya. Walaupun pada krisis imigran tahun 2015 media menggambarkan imigran muslim sebagai ‘pengungsi’, stereotip negatif yang terlanjur dipegang oleh masyarakat Polandia terhadap muslim tetap memandang muslim sebagai ancaman (MPC 2015).

Persepsi negatif Polandia terhadap pengungsi, khususnya muslim, semakin menguat karena terjadinya serangan terorisme di Paris pada November 2015. Staf Kementerian Luar Negeri Polandia Konrad Szymański menyatakan bahwa karena adanya aksi terorisme tersebut, Polandia tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan relokasi pengungsi ke Polandia, kecuali pengungsi dapat memastikan bahwa masuknya mereka ke Polandia tidak akan mengganggu keamanan nasional negara tersebut. Perdana Menteri Beata Szydło pun menyatakan hal yang serupa, yang mana ia meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali tentang kebijakan relokasi pengungsi sebagai akibat dari kekhawatiran

akan serangan terorisme (Potyrała 2016). Dalam hal ini, Szydło menekankan keamanan nasional sebagai variabel utama dalam posisi Polandia.

“Our top priority is the security of Polish citizens. If such commitments can be fulfilled without compromising the security of Poles, we will honor them. However, we will never agree to endanger Poles’ security.” (Potyrała 2016)

Dalam hal ini, Szydło menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah untuk melindungi keamanan masyarakat Polandia, yang mana jika kebijakan Uni Eropa dapat membantu Polandia melindungi warga negaranya, Polandia akan mengikuti kebijakan tersebut, dan sebaliknya (Potyrała 2016).

Gambaran bahwa imigran merupakan isu yang berbahaya bagi keamanan nasional Polandia berpengaruh pula pada bagaimana masyarakat selanjutnya memandang imigran. Pada Januari 2016, gerakan sosial *Kukiz’15* mulai mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah Polandia agar melakukan referendum terhadap kebijakannya untuk menerima imigran. *Kukiz’15* menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berbahaya bagi Polandia, baik sebagai negara ataupun budaya, karena Polandia tidak siap menerima komunitas yang asing dari Polandia. Berdasarkan hal tersebut, pada Mei 2016, jumlah tanda tangan yang diperoleh mencapai 193.561 dengan 95% di antaranya menolak penerimaan pengungsi, khususnya pengungsi muslim (Potyrała 2016).

Pasca serangan terorisme di Brussels pada Maret 2016, pemerintah Polandia mengambil kebijakan yang semakin ketat terkait imigran. Szydło menyatakan bahwa tujuan utama dari pemerintah Polandia adalah untuk melindungi warga negaranya sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima imigran

dalam kondisi yang sedemikian rupa. Mendukung pernyataan tersebut Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Błaszczak menyatakan bahwa terdapat hubungan antara serangan terorisme dengan jumlah imigran yang masuk ke Eropa, sehingga kebijakan untuk membatasi jumlah imigran di Eropa dinilai tepat untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya serangan terorisme (Potyrała 2016).

Pandangan negatif dari pemerintah dan masyarakat terhadap imigran, khususnya terhadap pengungsi muslim, merupakan salah satu wujud dari adanya sekuritisasi di negara tersebut. Obyek referensi dalam hal ini adalah Polandia dan warga negaranya. Hal ini karena kondisi Polandia yang merupakan negara homogen, ditambah dengan sejarah adanya pengusiran etnis lain dari Polandia di masa lalu. Selain itu, hal yang membuat Polandia terancam secara eksistensial dari keberadaan imigran, khususnya imigran muslim adalah karena adanya kekhawatiran tentang risiko ancaman yang ada. Risiko ancaman yang dimaksud adalah persepsi sebab-akibat apabila Polandia menerima pengungsi muslim yang diperkirakan akan mengancam keamanan warga Polandia. Pembingkai media terhadap muslim menjadi penyebab utama dari persepsi negatif dan munculnya rasa terancam dari pemerintah dan warga Polandia terhadap kedatangan imigran.

3.1.2. Aktor Sekuritisasi

Aktor sekuritisasi merupakan pihak yang menyatakan bahwa suatu obyek merupakan obyek referensi. Dengan kata lain, aktor sekuritisasi menyatakan bahwa obyek tersebut berada dalam posisi yang terancam. Aktor sekuritisasi berbeda dengan aktor yang mengimplementasikan kebijakan ataupun tindakan sekuritisasi, karena dalam praktiknya, tidak penting siapa yang melaksanakan tindakan tersebut, karena aktor sekuritisasi ditentukan berdasarkan siapa yang *menyatakan* obyek

sebagai obyek referensi (Buzan, Waever and de Wilde 1998). Umumnya, aktor sekuritisasi memiliki posisi kekuasaan tinggi dan berbicara atas nama negara. Dalam penelitian ini, aktor sekuritisasi yang menyatakan bahwa Polandia dan warga negaranya menghadapi ancaman eksistensial adalah pemerintah Polandia yang dipimpin oleh partai sayap kanan PiS.

Krisis imigran Eropa terjadi pada masa-masa pemilihan umum di Polandia, menyebabkan krisis imigran menjadi isu yang terpolitisasi. Pemerintah Polandia pada periode tersebut memiliki kebijakan yang pro-Eropa, sedangkan partai oposisi, yang merupakan partai sayap kanan, merupakan partai yang menolak penuh imigran, ditandai dengan kedekatannya dengan Hungaria. Kondisi ini membuat pemerintah Polandia memiliki posisi yang sulit, yang mana kesalahan dalam mengambil kebijakan dapat menghancurkan rezim pemerintah sentris. Terlebih, Polandia memiliki keterikatan yang lebih dekat dengan pandangan sayap kanan karena ketidaksukaan terhadap komunis ataupun sayap kiri, berkaitan dengan pandangan negatif Polandia terhadap Rusia ataupun Uni Soviet (MPC 2015).

Kondisi itu mendorong Polandia, yang ada saat itu dipimpin oleh koalisi partai sentris Civic Platform (*Platforma Obywatelska*, PO), untuk mengambil kebijakan menolak kuota distribusi pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang sebelumnya masuk ke Italia dan Yunani (Szczurbiak 2017). Perdana Menteri PO Ewa Kopacz menyatakan bahwa Polandia tidak sepenuhnya menolak pengungsi yang masuk, tetapi Polandia hanya akan menerima pengungsi dalam jumlah yang mereka mampu terima. Lebih lanjut, Kopacz menekankan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Polandia. Namun, posisi Polandia pun melunak ketika negara-negara Uni Eropa lainnya menyebut Polandia

gagal menunjukkan solidaritas kepada negara-negara Eropa lainnya yang juga mengalami krisis imigran (Potyrała 2016).

Isu imigran Eropa selanjutnya digunakan sebagai salah satu narasi dalam kampanye PO. Kopacz menyatakan bahwa partai oposisi tidak peduli terhadap keselamatan pihak-pihak yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan internasional. Lebih lanjut, Kopacz menekankan perlunya pemerintah Polandia untuk menjaga keamanan nasional, tetapi tetap dengan memberikan bantuan bagi pengungsi. Untuk itu, kebijakan pemerintahan PO selanjutnya pun terfokus pada upaya untuk membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, karena Polandia hanya akan menerima pengungsi yang benar-benar membutuhkan. Dalam memilih pun, Polandia hanya akan berdasar pada kriteria yang mereka tetapkan sendiri, bukan berdasarkan mekanisme yang diterapkan oleh Uni Eropa (Potyrała 2016).

Kebijakan tersebut secara tidak langsung justru mendukung pendapat dari partai Law and Justice (*Prawo i Sprawiedliwość*, PiS) yang menganggap bahwa Polandia harus menghindari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari imigran, seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa Barat dengan jumlah komunitas muslim yang cukup besar berkaitan dengan isu terorisme yang dianggap dilakukan oleh muslim. Walaupun PiS mendukung keanggotaan Polandia di Uni Eropa, PiS tetap menolak nilai-nilai Uni Eropa yang dinilai akan mengganggu nilai tradisional dan identitas nasional negara tersebut. PiS memandang bahwa masuknya imigran dalam jumlah besar dapat menimbulkan pertentangan budaya yang mengancam keamanan nasional (Szczerbiak 2017).

Namun, tidak lama kemudian, pemerintah Polandia mengubah arah kebijakannya dan memisahkan diri dari negara Visegrad, dengan menandatangani

burden-sharing bersama negara-negara Uni Eropa lainnya untuk menerima 6.200 imigran hingga tahun 2017. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah Polandia ingin memposisikan Polandia sebagai bagian dari Uni Eropa sehingga Polandia pun berupaya untuk menerapkan kebijakan yang membangun citra positif di mata negara-negara Eropa lainnya (Szczerbiak 2017).

Akan tetapi, dalam beberapa hari setelahnya, pemerintahan PO mengubah arah kebijakannya dan menyatakan akan menerima imigran selama imigran tersebut bukan merupakan imigran ilegal. Perubahan posisi terjadi kembali ketika Perdana Menteri PO Grzegorz Schetyna menyatakan hanya menerima pengungsi anak-anak dan perempuan yang memang melarikan diri dari kondisi perang ataupun konflik bersenjata (Szczerbiak 2017). Schetyna menekankan bahwa Polandia tidak akan mengikuti skema relokasi pengungsi yang dibuat oleh Uni Eropa, melainkan Polandia akan menentukan sendiri siapa dan berapa imigran yang akan diterima oleh negara tersebut (Cienski, Why Poland doesn't want refugees 2017).

Kemenangan PiS atas PO pada pemilihan umum tahun 2015 di bulan Oktober kembali menyebabkan perubahan dalam posisi Polandia terhadap krisis migran Eropa. PiS menyatakan perlunya perubahan terhadap perjanjian Uni Eropa terkait relokasi imigran, dengan menekankan pada perlunya Eropa untuk memastikan keamanan nasionalnya terlebih dahulu sebelum berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di luar Eropa. Untuk itu, Polandia menyarankan agar bantuan humaniter bagi pengungsi diberikan kepada negara penerima pengungsi pertama, yang dengan kata lain merupakan negara transit bagi pengungsi sebelum memasuki wilayah Eropa (Potyrała 2016).

PiS selanjutnya mengeluarkan rancangan resolusi terkait krisis imigran, yang mana menyatakan penolakan Polandia akan kebijakan relokasi 120.000 pengungsi dan menarik persetujuan pemerintah sebelumnya untuk menerima pengungsi. Pada April 2016, PiS menghentikan proses penerimaan imigran dengan alasan bahwa mekanisme verifikasi yang ditetapkan untuk menyeleksi imigran tidak benar-benar efektif untuk menjaga keamanan nasional Polandia. Bahkan, Polandia menyatakan akan mengirimkan pengungsi Suriah kembali ke negara asalnya dengan alasan bahwa ‘ratusan ribu pengungsi muda yang memasuki wilayah Eropa jika digabungkan dapat menjadi pasukan militer untuk membebaskan negara asalnya’ (Potyrała 2016). Di samping itu, PiS beranggapan bahwa kuota distribusi yang diterapkan Uni Eropa tidak masuk akal karena dalam jangka panjang, anggota keluarga dari pengungsi dapat ikut masuk ke Polandia, menyebabkan Polandia menerima lebih banyak imigran di masa mendatang. Sejak itu, Polandia, bersama dengan Hungaria, tidak pernah lagi menerima imigran di bawah skema relokasi Uni Eropa (Szczerbiak 2017).

PiS juga memanfaatkan kekhawatiran publik atas keputusan PO untuk menerima pengungsi. Walaupun Polandia mendapatkan tekanan dari Uni Eropa untuk menunjukkan solidaritasnya dalam krisis imigran, Polandia justru menekankan bahwa selama ini Polandia telah banyak berkontribusi terhadap Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Polandia Witold Waszczykowski menyatakan bahwa setiap satu euro yang diambil oleh Polandia dari Uni Eropa, Polandia juga menyumbang 80 sen kepada negara-negara Eropa Barat (Bachman 2016). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Polandia menolak

kewajibannya untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dengan dalih kontribusi ekonomi terhadap kawasan itu.

Di sini, dapat dilihat bahwa aktor sekuritisasi yang banyak berperan dalam munculnya isu sekuritisasi atas imigran adalah pemerintah Polandia yang dipimpin oleh partai sentris PO dan partai sayap kanan PiS. Hal ini dibuktikan dari pendapat kedua partai baik saat berkuasa maupun saat menjadi oposisi, yang mana keduanya menganggap bahwa Polandia dan Uni Eropa sendiri harusnya lebih mementingkan keamanan nasional dibandingkan keamanan para pengungsi. Namun, PiS sebagai sayap kanan menjadi aktor sekuritisasi yang dominan karena konsistensinya dalam isu imigran, sementara PO sempat merubah arah kebijakannya dengan menerima pengungsi yang legal sehingga kurang mendapatkan simpati.

PiS sendiri memainkan isu sekuritisasi dari adanya pengungsi dengan melempar opini bahwa para pengungsi, khususnya dari negara konflik, yang diterima oleh Polandia akan membentuk kelompok bersenjata di Eropa sehingga mengancam keamanan nasional Polandia. Selain itu, PiS juga berpendapat bahwa masuknya imigran akan melunturkan nilai-nilai kultural asli Polandia sehingga mengancam eksistensi masyarakatnya. Oleh karena itu, PiS mampu memanfaatkan kekhawatiran masyarakat Polandia yang sudah dibentuk persepsinya terhadap imigran melalui pbingkaian media. Hal ini membuat PiS mampu menolak kebijakan Uni Eropa agar Polandia dapat menerima imigran dalam kuota tertentu dengan dukungan yang ada.

3.1.3. Aktor Fungsional

Aktor fungsional merupakan aktor yang aktivitas dan keputusannya mempengaruhi hubungan antara obyek referensi dan aktor sekuritisasi, tetapi tidak

terlibat dalam keduanya. Dalam penelitian ini, aktor fungsional yang mempengaruhi obyek referensi dan aktor sekuritisasi adalah Uni Eropa. Uni Eropa sendiri tidak berkaitan secara langsung dengan obyek referensi, yakni keamanan Polandia dan warga negaranya. Uni Eropa juga bukan merupakan bagian dari pemerintah Polandia. Namun, keputusan dan sudut pandang Uni Eropa berpengaruh terhadap bagaimana sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah Polandia, baik berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa ataupun posisi yang diambil oleh pemerintah sayap kanan Polandia terhadap Uni Eropa.

Pada tahun 2017, Uni Eropa menuntut Polandia, bersama dengan Hungaria dan Republic Ceko, atas pelanggaran hukum Uni Eropa terkait penolakan negara-negara tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan relokasi imigran. Proses penyelesaian tuntutan tersebut dapat berlangsung hingga lima tahun, dengan Polandia membayar sanksi keuangan jika dinyatakan bersalah oleh European Court of Justice. Dalam jangka pendek, tuntutan tersebut memberikan konsekuensi politik yang semakin melemahkan posisi Polandia di Eropa. Hal tersebut karena sejak pemerintahan Polandia dipimpin oleh PiS, Polandia dinilai semakin terisolasi dari Eropa karena adanya perbedaan sudut pandang dan kebijakan yang diambil oleh keduanya. Kondisi itu diperburuk dengan pernyataan Perdana Menteri PiS Beata Szydło terkait serangan terorisme yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Dalam hal ini, Szydło menyatakan bahwa aksi terorisme tersebut disebabkan oleh keputusan negara untuk menerima imigran muslim dari Timur Tengah dan merupakan keputusan yang tepat bagi Polandia untuk menolak imigran sejak tahun 2015 (Szczerbiak 2017).

Menanggapi tuntutan dari Uni Eropa, Polandia menyatakan bahwa Uni Eropa menerapkan standar ganda terhadap Polandia dengan alasan bahwa negara-negara Eropa lainnya pun tidak benar-benar menepati komitmennya untuk menerima imigran dalam jumlah yang telah ditentukan. Di samping itu, Polandia berpendapat bahwa sikapnya menolak imigran dari luar Eropa merupakan upaya untuk melindungi perbatasan Eropa. Terlebih ketika Polandia menerima lebih dari satu juta imigran dari Ukraina, yang membuat jumlah imigran Ukraina di negara-negara Eropa lainnya cenderung lebih sedikit. Oleh karena itu, keputusan Polandia untuk menolak imigran dari Timur Tengah dan Afrika Utara dinilai masuk akal bagi pemerintah Polandia (Szczerbiak 2017).

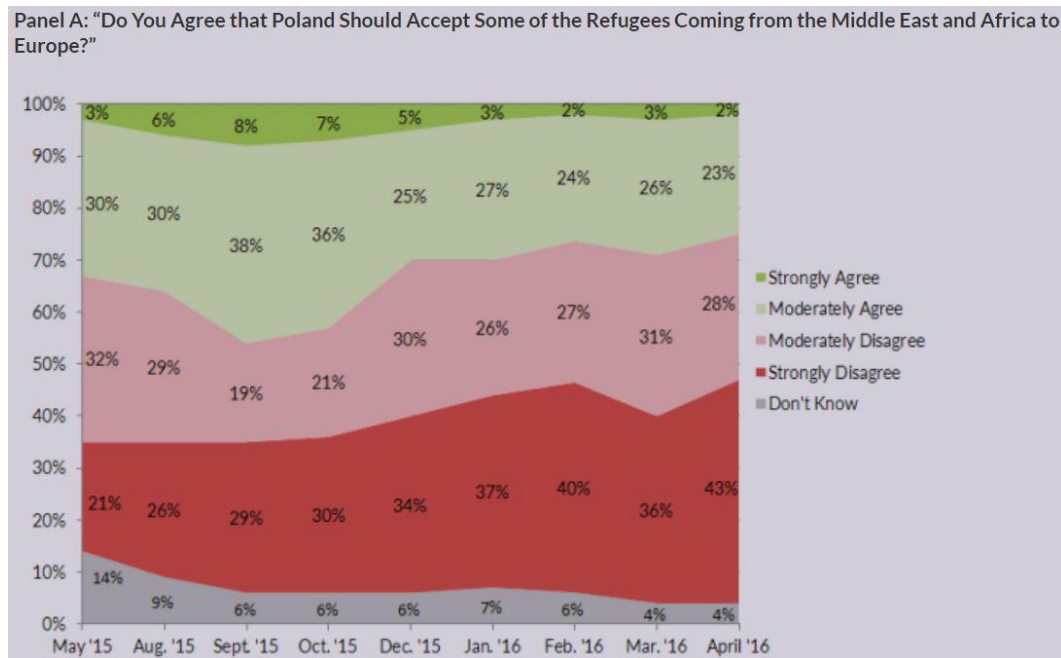
Pemerintahan Polandia di bawah PiS dipengaruhi oleh posisi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Hungaria. Hal tersebut karena pemimpin PiS, Jarosław Kaczyński, memiliki kedekatan dan mengagumi Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang menganut pandangan sayap kanan dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, kebijakan PiS pun didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Orban sebelumnya. Orban sendiri merupakan salah satu tokoh yang paling keras menolak skema distribusi imigran yang diterapkan oleh Uni Eropa (Boyle 2015).

Pada awal tahun 2016, tidak hanya Polandia yang menolak respons Uni Eropa terhadap krisis imigran, tetapi juga negara-negara Eropa lainnya. Mayoritas negara anggota Uni Eropa menolak skema distribusi imigran dengan alasan solidaritas. Mereka menuntut adanya wewenang negara individual untuk menetapkan kebijakannya sendiri terkait penerimaan imigran. Di samping itu, mereka juga menuntut Uni Eropa untuk lebih mempertimbangkan keamanan Uni

Eropa, negara anggota, dan warga negara Eropa, salah satunya dengan membatasi jumlah imigran (Potyrała 2016).

Sebagian besar masyarakat Polandia sendiri pada dasarnya menolak skema kuota imigran yang diajukan oleh Uni Eropa, dibuktikan dengan jumlah masyarakat Polandia yang menolak skema distribusi imigran Uni Eropa masih tinggi, yakni sebesar 60%. Padahal, penolakan Polandia untuk mengikuti keputusan Uni Eropa dapat berujung pada sanksi keuangan yang ditujukan kepada negara tersebut. Walaupun ketidaksetujuan tersebut tidak tampak pada imigran secara general, tetapi penolakan jelas terlihat pada imigran dengan latar belakang agama Islam (Szczerbiak 2017).

Gambar 2 Tingkat Penerimaan Masyarakat Polandia Terhadap Pengungsi Muslim



Sumber: Szczerbiak, 2017

Survei yang dilakukan oleh *CBOS* pada Mei 2017 menyatakan bahwa 70% masyarakat Polandia menolak menerima pengungsi yang berasal dari negara-negara Islam (Szczerbiak 2017). Angka tersebut meningkat pesat jika dibandingkan

dengan survei pada tahun 2014, dimana hanya sekitar 34,3% masyarakat Polandia yang menolak masuknya imigran muslim ke negara tersebut. Jika dibandingkan dengan respons masyarakat terhadap imigran dari negara lain, sebanyak 60% masyarakat Polandia bersedia untuk menerima imigran dari Ukraina, sedangkan imigran dari negara muslim hanya mendapatkan respons positif sebesar 25% (Bachman 2016). Adanya respons negatif terhadap imigran muslim salah satunya didasari oleh latar belakang budaya Polandia yang merupakan mayoritas Katolik, dengan jumlah etnis minoritas yang rendah. Menerima imigran muslim dalam jumlah besar dikhawatirkan akan memberikan ancaman bagi budaya dan keamanan di Polandia, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa lainnya (Szczerbiak 2017).

Pada Gambar 2, ditunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat Polandia terhadap imigran muslim cenderung rendah. Respons positif tertinggi terjadi pada September 2015, diperkirakan sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan pemerintah Polandia atas kuota relokasi pengungsi Uni Eropa. Akan tetapi, penurunan signifikan tampak pada Desember 2015 yang diperkirakan terjadi karena pemilihan umum parlementer Polandia pada bulan Oktober dan serangan teror di Paris pada bulan November (Bachman 2016).

Di sisi lain, Polandia juga khawatir jika kedekatan kulturalnya terhadap Eropa Barat akan terganggu dengan masuknya budaya lain yang bertolak belakang dalam jumlah besar. Padahal, salah satu alasan bergabungnya Polandia ke Uni Eropa adalah karena rasa keterkaitan yang besar secara budaya dan spiritual terhadap Eropa. Walaupun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, muncul pertentangan di dalam masyarakat Polandia sendiri terkait nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh Polandia dengan Uni Eropa. Nilai-nilai tersebut dianggap

bertentangan dengan nilai liberal yang dianut oleh sebagian besar negara di Eropa. Terbukti dengan perbedaan posisi yang dimiliki oleh Polandia dan Uni Eropa dalam memandang krisis imigran yang terjadi sejak tahun 2015 (Szczerbiak 2017).

Di sini, dapat dilihat bahwa aktor fungsional yang mampu memengaruhi dinamika dari kedua unit lainnya, tetapi tidak termasuk ke dalam obyek referensi atau aktor sekuritisasi adalah Uni Eropa. Hal ini karena Uni Eropa justru menjadi salah satu pemicu yang memperkuat sikap pemerintah Polandia serta pandangan masyarakatnya terhadap isu imigran. Polandia menganggap bahwa Uni Eropa sudah bertindak secara tidak adil karena mengeluarkan kebijakan secara sepihak dan memberatkan Polandia sendiri.

Uni Eropa juga memperparah persepsi Polandia dalam menerima imigran sekaligus menyamakan nilainya dengan negara anggota lainnya. Hal ini karena Uni Eropa dinilai menjatuhkan sanksi yang berlebihan tanpa memikirkan kondisi ancaman keamanan nasional yang dikhawatirkan oleh Polandia. Tidak hanya itu, Polandia juga menganggap bahwa Uni Eropa melalui kebijakan imigran yang diterapkan akan mengancam eksistensi budaya Polandia yang bisa tersingkirkan.

3.2. *Existential Threat*

Existential threat dimaknai sebagai suatu objek yang dibangun dan disepakati bersama sebagai suatu ancaman karena dianggap memiliki potensi untuk membahayakan keamanan maupun eksistensi dari kelompok masyarakat tertentu.

Polandia memiliki demografi masyarakat yang homogen. Hal ini membuat keberagaman di Polandia dinilai kurang beragam. Homogenitas Polandia sendiri dapat dilihat sejarahnya sejak era Perang Dunia ke-2. 10 persen populasi Polandia merupakan Yahudi, didukung dengan berbagai etnis minoritas yang berasal dari

beberapa negara di Eropa, seperti Ukraina, Belarusia, Jerman, dan negara lainnya. Namun, Perang Dunia 2 menyebabkan beberapa etnis minoritas di Polandia berkurang akibat kekejaman Nazi dan upaya pembersihan etnis pada masa tersebut. Hal ini membuat lebih dari 90 persen masyarakat berasal dari etnis Polandia dan memeluk agama Katolik (Cienski, Why Poland doesn't want refugees 2017).

Sejarah homogen Polandia menyebabkan masyarakat Polandia tidak memiliki kontak lebih dengan keberagaman yang ada dan cenderung skeptis terhadap imigran, khususnya pengungsi. Skeptisme tersebut diperparah dengan persepsi masyarakat Polandia yang menganggap jika warga Polandia yang bermigrasi ke negara Barat dianggap sebagai beban bagi *host country* (MPC, Polish response to the refugee crisis: where the wild things are? 2015). Oleh karena itu, munculnya anggapan jika pengungsi atau imigran merupakan beban negara membuat masyarakat Polandia merasa para pengungsi tersebut merupakan ancaman yang dapat membebani Polandia, yang mana negara tersebut sejatinya dianggap belum semaju negara-negara Barat lainnya. Beban tersebut pun bervariasi, mulai dianggap sebagai beban ekonomi karena uang pajak dari masyarakat Polandia digunakan untuk membantu para pengungsi, hingga ketakutan jika para pengungsi tersebut akan merebut lapangan pekerjaan masyarakat Polandia.

Selain itu, Masyarakat Polandia menganggap jika para imigran Timur Tengah yang masuk ke Polandia akan menghadapi kesulitan untuk beradaptasi dengan budaya dan lingkungan di Polandia. Timur Tengah dan Afrika dengan Polandia sendiri memiliki perbedaan jauh terkait budayanya. Terlebih, mayoritas masyarakat Polandia memeluk agama Katolik, berbeda dengan imigran asal Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas memeluk agama Islam. Perbedaan tersebut

dinilai bagi masyarakat Polandia akan menjadi ancaman pada proses integrasi masyarakatnya. Terlebih, Polandia sendiri memiliki pengalaman yang minim saat berurusan dan berinteraksi dengan masyarakat asing; Hal ini menimbulkan rasa tidak aman dari masyarakat terhadap imigran. Terlebih, masyarakat Polandia juga menilai jika para pengungsi maupun imigran dapat menyebabkan benturan budaya yang menyebabkan rusak dan lunturnya budaya-budaya asli Polandia yang berbaur dengan budaya para imigran (Morath 2017).

Ketakutan masyarakat Polandia terhadap imigran atau pengungsi seakan tervalidasi dengan pemberitaan media massa terkait tentang bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti Suriah. Media massa berfokus pada kekerasan yang terjadi dalam konflik tersebut sehingga membentuk opini masyarakat jika para pengungsi di Timur Tengah pada dasarnya merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan seluruh warga negara Polandia. Kondisi tersebut diperparah dengan bias yang muncul di masyarakat Polandia terhadap pengungsi dari Timur Tengah, yang mana baik masyarakat maupun media menganggap jika pengungsi dari Timur Tengah tidak berpendidikan, bermasalah, hingga dianggap sebagai bagian dari kelompok teroris (Sales 2023).

Stigma bahwa pengungsi dari Timur Tengah dianggap sebagai teroris semakin menguat setelah aksi terorisme yang terjadi di Jerman, Perancis, dan Belgia pada tahun 2014 hingga 2016. Rentetan aksi terorisme tersebut dikaitkan dengan gelombang pengungsi yang berasal dari Timur Tengah. Masyarakat Polandia semakin khawatir dan terancam dengan wacana menerima pengungsi untuk masuk ke negara tersebut, yang mana dianggap akan mengancam keselamatan warga karena berpotensi dapat melakukan tindakan kekerasan. Selain

itu, masyarakat Polandia memiliki stigma bahwa Islam tidak toleran terhadap kepercayaan lain seperti Katolik. Hal ini yang menyebabkan jika pengungsi dan imigran dari Timur Tengah dapat mengancam masyarakat Polandia (Morath 2017).

Melihat persepsi masyarakat Polandia terhadap pengungsi dan imigran dari Timur Tengah, dapat dilihat jika mereka melihat para imigran sebagai *external threats* bagi Polandia itu sendiri.

3.3. *Speech Act dan Emergency Action*

3.3.1. *Speech Act*

Suatu ide sekuritisasi sendiri memerlukan upaya untuk menyebarkan ide bahwa muncul suatu ancaman sehingga perlu adanya sekuritisasi terhadap isu tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui orasi, pidato, hingga kutipan yang menjadi pernyataan sikap otoritas atau pejabat politik terhadap suatu isu, yang mana disebut juga sebagai *speech act*.

Pada isu migrasi di Polandia dalam lingkup Krisis Imigran di Uni Eropa, pernyataan sikap pemerintah Polandia dalam wacana penerimaan pengungsi konflik Timur Tengah dengan konsisten menegaskan untuk menolak menerima pengungsi tersebut. Pernyataan sikap tersebut sudah dilayangkan oleh pemerintah Polandia, khususnya partai PiS, sejak masa kampanye pemilihan di tahun 2015. Jaroslaw Kaczynski, pemimpin partai PiS, dalam kampanyenya menyatakan jika Polandia dipaksa untuk menerima puluhan ribu pengungsi muslim dari Timur Tengah. Kaczynski menambahkan jika para imigran tersebut membawa penyakit dan parasit ke wilayah Eropa sehingga membahayakan masyarakat Polandia. Selain itu, Kaczynski juga menyebutkan jika para imigran tersebut akan menerapkan

hukum syariah di Eropa dan akan menginjak kepercayaan lainnya (Cienski, Migrants carry ‘parasites and protozoa,’ warns Polish opposition leader 2015).

Pernyataan tersebut membantu PiS terpilih dan memenangkan pemilihan di tahun 2015 karena mendapatkan simpati dari masyarakat Polandia. Narasi tersebut terus digaungkan oleh pemerintah Polandia yang dipimpin oleh PiS sebagai partai sayap kanan, sebagai penegasan pernyataan sikap Polandia atas isu migrasi. Salah satunya adalah pada peringatan penghormatan bagi warga Polandia yang pertama kali masuk Kamp Auschwitz. Beata Szydlo memberikan pidato dalam acara peringatan penghormatan bagi warga Polandia yang menjadi korban kekejaman di Auschwitz selama Perang Dunia 2. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam melindungi warganya. Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai upaya Polandia dalam mempertahankan keputusannya untuk tidak membuka pintu bagi para pengungsi. Sebelumnya, Szydlo juga menyatakan bahwa Uni Eropa belum berhasil mengatasi ancaman terorisme yang terjadi di beberapa negara di Eropa, seperti Perancis, Jerman, dan Belgia (Szczerbiak 2017).

Selanjutnya di tahun 2017, Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Błaszczak menyatakan jika setuju untuk menerima pengungsi dari Timur Tengah masuk ke Polandia sama saja dengan memicu bom waktu di Polandia sehingga menolak masuknya imigran merupakan langkah untuk “menjinakkan” bom waktu tersebut (Cienski, Why Poland doesn’t want refugees 2017). Selain itu, Błaszczak juga pernah menyatakan jika aksi serangan terorisme yang terjadi di Eropa berkaitan erat dengan masuknya arus pengungsi dari Timur Tengah, yang mana pernyataan tersebut memperkuat stigma di Polandia jika imigran yang masuk ke

Eropa dapat berpotensi menjadi teroris dan mengancam keselamatan masyarakat (Potyrała 2016).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh pemerintah Polandia pada tahun 2017, yang mana menyebutkan jika Polandia ingin menjadi bagian Uni Eropa, tetapi mereka harus menghormati kedaulatan Warsawa. Hal ini diartikan sebagai Polandia mempersilahkan para imigran untuk mengajukan diri mendapatkan izin tinggal di Polandia, tetapi keputusan apakah izin tersebut diterima atau tidak bergantung pada keputusan pemerintah Polandia itu sendiri (Makhroja 2020). Pernyataan tersebut dinilai menyatakan bahwa tidak hanya para imigran dapat menjadi ancaman bagi Polandia, tetapi juga kedaulatan Polandia dapat terancam dengan adanya intervensi dari Uni Eropa dalam isu Krisis Imigran 2015-2018.

3.3.2. *Emergency Action*

Setelah munculnya pernyataan sikap atau *speech act* terkait adanya ancaman, yang mana pernyataan tersebut disetujui oleh masyarakat sehingga membulatkan konsepsi tentang ancaman yang ada sebagai *external threat*, maka langkah selanjutnya pada proses sekuritisasi adalah pengambilan tindakan yang disebut sebagai *emergency action*. *Emergency action* ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan bahkan dijustifikasi untuk mengeliminasi ancaman yang ada walaupun melewati batas.

Dalam isu migrasi di Polandia pada Krisis Imigran Eropa 2015, ada beberapa tindakan yang menegaskan penolakan Polandia terhadap imigran sebagai bagian dari sekuritisasi. Setelah menyatakan penolakan terhadap masuknya imigran dari Timur Tengah dan Afrika, pemerintah Polandia di bawah partai PiS merevisi kebijakan pemerintah Polandia sebelumnya terkait penerimaan imigran. Pada revisi

tersebut, pemerintah Polandia menegaskan untuk lebih mengutamakan keamanan nasional dan keselamatan warga negaranya terlebih dahulu. Selain itu, perubahan kebijakan tersebut juga menekankan proses negosiasi antara Polandia dengan negara transit para imigran untuk memperkuat penjagaan di perbatasan dan mendorong para imigran untuk kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, pemerintah Polandia memutuskan untuk menahan proses penerimaan maupun relokasi imigran dari Timur Tengah dan hanya menerima imigran yang memiliki jaminan keamanan bagi Polandia (Potyrała 2016).

Emergency action lain dari pemerintah Polandia dapat dilihat dari sikapnya terhadap komitmen Uni Eropa dalam isu imigran. Bersama dengan negara-negara Visegrad lainnya seperti Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia, Polandia telah menandatangani sebuah deklarasi mengenai tanggapan terhadap krisis migrasi di Eropa. Dalam deklarasi tersebut, Polandia mengecam kebijakan Uni Eropa yang hendak mengalokasikan pengungsi berdasarkan kapasitas setiap negara (European Commission 2015). Tindakan tersebut secara terang-terangan melawan komitmen Uni Eropa dalam mengatasi isu imigran yang terjadi. Meskipun mendapat kecaman dari Uni Eropa dan beberapa negara anggota, tetapi Polandia tetap bersikeras pada sikapnya terkait isu imigran yang terjadi.

Kebijakan maupun tindakan tersebut semakin konsisten, yang mana di tahun 2018, Mateusz Morawiecki yang menjabat Perdana Menteri Polandia saat itu, menyatakan jika pemerintah Polandia dengan tegas tidak akan memenuhi kuota wajib dari Uni Eropa untuk menampung imigran dari Timur Tengah yang berada di Italia dan Yunani. Hal ini merupakan bentuk komitmen mereka sejak masa kampanye 2015. Tindakan tersebut dinilai ekstrim, mengingat Uni Eropa sendiri

mengancam untuk mencopot hak pilih Uni Eropa dalam organisasi tersebut (Euronews 2018).

3.4. Hubungan antar Unit

Melihat *speech act* yang dilakukan pemerintah Polandia untuk menyebarluaskan pemahaman jika imigran dari Timur Tengah merupakan ancaman bagi Polandia dan kedaulatannya, yang mana masyarakat Polandia sepakat akan adanya *existential threat* sehingga menjustifikasi dan mendorong otorita untuk melakukan *emergency action*, maka tindakan dan sikap tersebut akan memengaruhi hubungan Polandia dengan Uni Eropa itu sendiri.

Uni Eropa sendiri merupakan aktor fungsional yang memiliki peranan signifikan dalam perumusan kebijakan terkait imigran di negara-negara Eropa, khususnya Polandia. Melihat sikap Polandia yang melakukan sekuritisasi dari keberadaan imigran yang dianggap ancaman bagi negara tersebut, Uni Eropa secara terbuka mengecam sikap Polandia yang justru tidak memenuhi komitmennya. Hal ini disebabkan karena Polandia sebelumnya telah menandatangani perjanjian untuk menerima alokasi imigran untuk masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, European Commission menggunakan prosedur pelanggaran hukum Uni Eropa terhadap Polandia yang dapat berujung pada hukuman finansial bagi negara tersebut (Szczerbiak 2017).

Hal tersebut direspons pemerintah Polandia dengan menyatakan jika Uni Eropa berusaha mengucilkan Polandia. Selain itu, pemerintah Polandia juga melawan gugatan European Commission dan menyebutkan bahwa keputusan Uni Eropa harus membutuhkan suara bulat sehingga tidak valid. Hubungan antar unit semakin memanas dengan sindiran pemerintah Polandia yang menyebutkan jika

Uni Eropa gagal mengantisipasi serangan teroris di Eropa yang disebabkan oleh imigran (Szczerbiak 2017).

Setelah mendapat dukungan dari negara Visegrad, Polandia bersama kelompok negara Visegrad justru menandatangani perjanjian yang merupakan ancaman terhadap kebijakan imigran Uni Eropa (European Commission 2015). Tentunya hal ini memperlebar jarak hubungan antara Polandia dengan Uni Eropa, diperparah dengan ancaman Uni Eropa untuk mencopot hak pilih Polandia yang tidak digubris dan justru membuat Polandia semakin tegas dalam isu sekuritisasi tersebut (Euronews 2018).

Dapat dilihat jika Polandia membebaskan diri dari aturan maupun hukum yang mengikat dari Uni Eropa sebagai bentuk sekuritisasinya. Sekuritisasi tersebut dinilai efektif karena selain memenuhi komponen *existential threats*, *speech act*, dan *emergency action*, pemerintah Polandia juga memenuhi hubungan antar unit dengan mementingkan prosesi sekuritisasi dan pencegahan ancaman yang ada meskipun melanggar aturan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa Polandia merupakan negara yang homogen dan lebih sering melakukan emigrasi dibandingkan menerima imigran. Polandia yang bersifat homogen sendiri membuat mereka sulit untuk menerima pengungsi pada Krisis Migrasi Eropa pada tahun 2015-2018 karena berbagai ancaman dan ketakutan yang dimiliki masyarakat serta bagaimana pemerintah Polandia memandang status dari pengungsi tersebut. Oleh karena itu, isu sekuritisasi pasca Krisis Migrasi Eropa pada tahun 2015-2018, menjadikan isu tersebut merupakan isu keamanan yang tidak bisa diabaikan, diangkat oleh pemerintah Polandia sebagai aktor sekuritisasi utamanya. Dalam hal ini, Polandia melalui Partai *Law and Justice* atau PiS berperan besar dalam melanggengkan isu sekuritisasi terhadap masuknya arus pengungsi tersebut. Hal ini membuat pemerintah Polandia berhasil bertindak di luar prosedur politik dengan memanfaatkan narasi ancaman terhadap keamanan nasional Polandia dengan masuknya imigran.

Munculnya sekuritisasi pada isu migrasi arus pengungsi yang masuk ke Eropa, khususnya di Polandia sendiri didasarkan dengan adanya obyek referensi, yang mana dalam hal ini adalah eksistensi keamanan masyarakat Polandia yang dinilai terancam dengan adanya imigran. Hal ini karena Polandia sendiri merupakan negara homogen yang masyarakatnya lebih familiar dengan emigrasi dibandingkan menerima imigran. Selain itu, Polandia juga memiliki masa lalu yang menyebabkan imigran kurang dapat diterima di masyarakat karena dapat berdampak terhadap

eksistensi nilai-nilai kebudayaan Polandia. Tidak hanya itu, masyarakat Polandia juga memiliki persepsi negatif terhadap imigran, khususnya pengungsi muslim, karena adanya pemberitaan media yang seringkali memberitakan aksi terorisme oleh kelompok tertentu. Pemberitaan ini menyebabkan munculnya pembungkaman terhadap pengungsi muslim yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Polandia dan hal ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah Polandia untuk meraup suara dan menjadikan dasar dalam menolak kebijakan kuota migrasi pengungsi Uni Eropa.

Sementara, aktor fungsional dalam hal ini merupakan Uni Eropa, khususnya bagaimana Uni Eropa mengeluarkan kebijakan terkait tentang imigran dan sanksi yang dijatuhkan oleh negara tersebut. Uni Eropa menganggap bahwa Polandia telah melanggar hukum dengan tidak menerima imigran sesuai kuota yang ditetapkan sehingga memberikan sanksi terhadap negara tersebut. Hal ini tentunya mendapatkan penolakan keras dari Polandia yang menganggap bahwa Uni Eropa tidak memikirkan keamanan nasional Polandia serta bersikap tidak adil. Selain itu, Polandia juga menganggap bahwa negara tersebut sudah memberikan kontribusi yang besar dalam hal finansial terhadap Uni Eropa tetapi justru dikucilkan dalam organisasi tersebut. Anggapan tersebut semakin menegaskan sikap Polandia dalam melakukan sekuritisasi isu migrasi karena memberikan validasi bahwa masuknya pengungsi semakin tidak menguntungkan negara tersebut.

Selain ketiga unit tersebut, untuk dapat dinyatakan sebagai sekuritisasi, isu imigran di Polandia harus melalui tiga tahapan sekuritisasi, yakni adanya ancaman eksistensial, tindakan darurat, dan dampaknya terhadap hubungan antarunit. Dalam hal ini, ancaman eksistensial yang dimaksud adalah imigran, khususnya dari negara-negara muslim, yang dinilai memunculkan ancaman bagi Polandia dan

warga negaranya, yang dalam penelitian ini ditetapkan sebagai obyek referensi. Adanya ancaman eksistensial tersebut mendorong pemerintah Polandia untuk mengambil tindakan darurat, yaitu dengan melarang masuknya imigran dalam jumlah besar ke Polandia. Kondisi ancaman eksistensial itu berpengaruh pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat Polandia, yang mana masyarakat semula tidak berkeberatan dengan imigran yang masuk ke negaranya. Namun, dengan adanya sekuritisasi, pemerintah pun mengambil tindakan darurat dengan menolak imigran tanpa adanya legitimasi keputusan dari masyarakat.

Oleh karena itu, penulis juga menyimpulkan bahwa pemerintah Polandia melalui PiS telah menggiring isu imigran dari yang awalnya merupakan isu kemanusiaan menjadi isu keamanan nasional terhadap datangnya pengungsi dengan sekuritisasi yang digunakan karena dapat mengancam eksistensi masyarakat, keamanan, serta budaya Polandia.

4.2 Rekomendasi

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hambatan, seperti kesulitan dalam mencari data kredibel yang sebagian besar berasal dari sumber dengan bahasa Polandia. Penulis juga kesulitan untuk menemukan data yang terfokus dari sudut pandang Polandia secara spesifik, karena sebagian besar sumber menjelaskan tentang Uni Eropa secara umum, atau negara Visegrad.

Untuk itu, penulis mengimbau kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk menggunakan sumber pembahasan yang lebih luas dari berbagai bahasa untuk memperkuat kredibilitas penelitian. Penulis juga menyarankan untuk peneliti

selanjutnya agar memilah data-data yang ada agar hasil penelitian dapat lebih spesifik dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. 2019. *Polish MP: 'For me, multiculturalism is not a value'*. Accessed April 19, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=ccOp0I8ZPho>.
- Ambroziak, Adam A., and Michal Scwhabe. 2016. "Factors influencing immigration to Poland as an EU member state." In *Yearbook of Polish European Studies*, by Bogdan Góralczyk and Małgorzata Pacek, 151-187. Warsawa: Centre for Europe University of Warsaw.
- Anandita, Rizky, Fadia Ayunabila, Dasa Safitri, and Rahmatul Amalia. 2018. "Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi." *Jurnal Hubungan Internasional* 1 (2): 190-202. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/10976/8097>.
- Bachman, Bart. 2016. *Diminishing Solidarity: Polish Attitudes toward the European Migration and Refugee Crisis*. Juni 16. Accessed Januari 30, 2023. <https://www.migrationpolicy.org/article/diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european-migration-and-refugee-crisis>.
- BBC. 2016. *Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts*. Maret 4. Accessed Januari 26, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.
- . 2016. *Why is EU struggling with migrants and asylum?* Maret 3. Accessed Januari 30, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>.
- Birnbaum, Michael, and Griff Witte. 2015. *'People in Europe are full of fear' over refugee influx*. September 3. Accessed Januari 27, 2023. https://www.washingtonpost.com/world/hungarys-leader-to-migrants-please-dont-come/2015/09/03/d5244c6d-53d8-4e82-b9d7-35ec41ca2944_story.html.
- Boyle, Catherine. 2015. *Poland election: Migrant crisis affecting EU politics*. Oktober 26. Accessed April 1, 2023. <https://www.cnbc.com/2015/10/26/poland-election-migrant-crisis-affecting-eu-politics.html>.
- Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Pub.
- Chan, Sewell, and Palko Karasz. 2015. *Thousands of Migrants Flood into Austria*. September 19. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.nytimes.com/2015/09/20/world/europe/thousands-flood-into-austria-as-refugees-are-bounced-around-europe.html>.
- Chicago Tribune. 2015. *The Latest: Slovenian police pepper spray migrants at border*. September 19. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.chicagotribune.com/nation-world/sns-bc-eu--europe-migrants-the-latest-20150918-story.html>.
- Ciensi, Jan. 2015. *Migrants carry 'parasites and protozoa,' warns Polish opposition leader*. Oktober 14. Accessed Agustus 21, 2023. <https://www.politico.eu/article/migrants-asylum-poland-kaczynski-election/>.
- . 2017. *Why Poland doesn't want refugees*. Mei 21. Accessed Maret 15, 2023. <https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/>.

- Clayton, Jonathan, and Hereward Holland. 2015. *Over one million sea arrivals reach Europe in 2015*. Desember 30. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html>.
- de Lima, P., S. Bernabe, R. L. Bubbico, S. Leonardo, and C. Weiss. 2016. *Migration and the EU: Challenges, opportunities, the role of EIB*. Luxembourg: European Investment Bank. https://www.eib.org/attachments/migration_and_the_eu_en.pdf.
- Duszczek, Maciej, and Kamil Matuszczyk. 2018. "The Employment of Foreigners in Poland and the Labour Market Situation." *Central and Eastern European Migration Review* 7 (2): 53-68. doi:10.17467/ceemr.2018.07.
- DW. 2015. *Pressure on EU states that reject refugee quotas*. September 15. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.dw.com/en/berlin-calls-for-sanctions-on-eu-states-that-reject-refugee-quotas/a-18714957>.
- ENAR. 2016. *Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe*. Brussels: European Network Against Racism.
- Euronews. 2018. *Poland Refuses Middle Eastern Migrants*. Januari 2. Accessed Agustus 21, 2023. <https://www.euronews.com/2018/01/02/poland-refuses-mid-east-migrants>.
- European Commission. 2015. *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration*. Brussels: European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0240>.
- . 2015. *Refugee Crisis: European Commission takes decisive action*. September 9. Accessed Maret 13, 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5596.
- European Union. 2016. *Poland*. Accessed April 2, 2023. https://web.archive.org/web/20160713195258/http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_en.htm#goto_2.
- Eurostat. 2015. *The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014*. Luxembourg: Eurostat Press Office. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b>.
- Harper, Jo. 2018. *Poland fears economic hit as EU opens door to Ukrainians*. Januari 30. Accessed Agustus 2, 2022. <https://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-eu-opens-door-to-ukrainians/a-42367764>.
- Henley, Jon. 2018. *What is the current state of the migration crisis in Europe?* November 21. Accessed Januari 30, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook>.
- Holehouse, Matthew. 2015. *Germany drops EU rules to allow in Syrian refugees*. Agustus 24. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11821822/Germany-drops-EU-rules-to-allow-in-Syrian-refugees.html>.
- Horn, Heather. 2015. *Is Eastern Europe Any More Xenophobic Than Western Europe?* Oktober 16. Accessed Januari 30, 2023.

- <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/xenophobia-eastern-europe-refugees/410800/>.
- Iglicka, Krystyna, and Magdalena Ziolek-Skrzypczak. 2010. *EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges*. September 1. Accessed Januari 25, 2023. <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges>.
- Kingsley, Patrick, and Emma Graham-Harrison. 2015. *UN warns European unity at risk as borders close to refugees*. September 19. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/19/refugees-croatia-hungary-borders-europe>.
- Kostrzewa, Zofia, Paweł Kaczorowski, Dorota Szałtys, Agnieszka Dobrzyńska, Małgorzata Potocka, Patrycja Ziółkowska, Małgorzata Cierniak-Piotrowska, and Agata Franecka. 2020. *Demographic situation in Poland up to 2019: International migration of population in 2000-2019*. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny (Statistics Poland).
- Krzysztof, Jaskulowski. 2019. "The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland." *Between Nationalism, Fear and Empathy* 1 (5). doi:10.1007/978-3-030-10457-3.
- Lehne, Stefan. 2016. *How the Refugee Crisis Will Reshape the EU*. Februari 4. Accessed Januari 28, 2023. <https://carnegieeurope.eu/2016/02/04/how-refugee-crisis-will-reshape-eu-pub-62650>.
- Lesinska, Magdalena. 2021. *European Website on Integration*. November 30. Accessed Februari 26, 2023. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/majority-poles-oppose-admission-migrants-polish-belarusian-border_en.
- Longhi, S., P. Nijkamp, and J. Poot. 2008. "Meta-Analysis of Empirical Evidence on the Labour Market Impacts of Immigration." *IZA Discussion Paper* (3418).
- Makhroja, Mega N. 2020. "Sekuritisasi isu migrasi di Polandia pasca Krisis Pengungsi di Uni Eropa." *IJPSS* 2 (1): 1-15.
- Morath, Annika. 2017. *'Poland for the Polish' ? Taking a Closer Look at the Polish Rejection of Refugees*. Juni 14. Accessed Agustus 2023, 20. <https://eu.boell.org/en/2017/06/14/poland-polish-taking-closer-look-polish-rejection-refugees>.
- MPC. 2015. *Polish response to the refugee crisis: where the wild things are?* Oktober 6. Accessed Januari 26, 2023. <https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/polish-response-to-the-refugee-crisis-where-the-wild-things-are/>.
- . 2015. *Polish response to the refugee crisis: where the wild things are?* Oktober 6. Accessed Februari 26, 2023. <https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/polish-response-to-the-refugee-crisis-where-the-wild-things-are/>.
- Okolski, Marek. 1999. "Poland's migration: Growing diversity of flows and people." *Prace Migracyjne* (29): 1-27.
- Porter-Szücs, Brian. 2015. *Poland, long accustomed to emigration, must now confront immigration*. September 24. Accessed Januari 30, 2023. <https://theconversation.com/poland-long-accustomed-to-emigration-must-now-confront-immigration-47985>.

- Potyrała, Anna. 2016. "Poland towards the migration crisis of 2015-2016." *Migration Crisis in the European Union: Idealism vs. Realism*. doi:10.14746/pp.2016.21.2.6.
- Radio Poland. 2018. *Migration policy decisions up to EU members: Polish PM in Budapest*. Accessed April 19, 2022. <http://archiwum.thenews.pl/1/10/Artykul/342582,Migration-policy-decisions-up-to-EU-members-Polish-PM-in-Budapest>.
- Rankin, Jennifer. 2020. *EU court rules three member states broke law over refugee quotas*. April 2. Accessed April 19, 2022. <https://www.theguardian.com/law/2020/apr/02/eu-court-rules-three-countries-czech-republic-hungary-poland-broke-law-over-refugee-quotas>.
- RFE/RL. 2015. *EU Warns Against New 'Walls' As Hungary Plans Fence On Serbia Border*. June 18. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.rferl.org/a/european-commission-hungary-serbia-wall-fence-illegal-migrants/27079829.html>.
- Ritter, Jenny, Markus Rhomberg, Melani Barlai, Birte Fähnrich, and Christina Griessler. 2017. "Introduction: European Perspectives and National Discourses on the Migrant Crisis." In *The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses*, by Melani Barlai, Birte Fähnrich, Christina Griessler and Markus Rhomberg. Zürich: LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien.
- Sales, Matías Ibañez. 2023. "The Refugee Crisis' Double Standards: Media Framing and the Proliferation of Positive and Negative Narratives During the Ukrainian and Syrian Crises." *Euromesco Policy Brief* (129): 1-12.
- Sobczak-Szelc, Karolina, Marta Pachocka, Konrad Pędziwiatr, and Justyna Szałańska. 2020. *Integration Policies, Practices, and Experiences: Poland Country Report*. Working Papers, Warsaw: RESPOND: Multilevel Governance of Migration and Beyond.
- Szczerbiak, Aleks. 2017. *How is the European migration crisis affecting Polish politics?* Juli 6. Accessed Maret 14, 2023. <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/06/european-migration-crisis-affecting-polish-politics/>.
- Szylko-Skoczny, Malgorzata, and Maciej Duszczczyk. 2020. *Polish immigration policy - opportunities and challenges for the labour market*. Poland: Institute of Social Policy University of Warsaw.
- Traynor, Ian. 2015. *Refugee crisis: east and west split as leaders resent Germany for waiving rules*. September 5. Accessed Januari 27, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/05/migration-crisis-europe-leaders-blame-brussels-hungary-germany>.
- Trihartono, Agus, Suyani Indriastuti, and Chairun Nisa. 2020. *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publishing.
- UNHCR. n.d. *Pengungsi - UNHCR Indonesia*. Accessed April 19, 2022. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.
- Waever, Ole. 1996. "European Security Identities." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 34 (1).
- White, Anne, Izabela Grabowska, Pawel Kaczmarczyk, and Krystyna Slany. 2018. "The impact of migration from and to Poland since EU accession." In *The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change*,

- by Anne White, Izabela Grabowska, Pawel Kaczmarczyk and Krystyna Slany, 10-41. London: UCL Press.
- Wiacek, Elzbieta. 2017. "Poland's Refugee Policy and Polish Society Between Values of Survival and Self-Expression." *Intercultural Relations* 1 (2): 165-188. doi:10.12797/RM.01.2017.02.10.
- World Bank. 2016. *Migration and Remittances Factbook 2016*. New York: World Bank Group.
- Żołędowski, Cezary. 2020. "Poland in international migrations: The perspective of world systems theory." *Miscellanea Geographica* 24 (2): 94-103.